

RENCANA KERJA (RENJA)

DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK



20
26

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselesaikannya dokumen Rencana Kerja Tahun 2026 Dinas Sosial Kota Pontianak ini sebagai penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025 – 2029.

Di dalam dokumen ini memuat konsep, rencana kerja, indikator kinerja, dan pendanaan pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang ikut andil untuk menyumbangkan pemikiran, ide dan tenaga guna menyelesaikan dokumen ini. Kami berupaya menyajikan informasi dengan selengkap-lengkapnyanya walaupun disadari masih terdapat kelemahan dan kekurangan dalam penyajiannya.

Selanjutnya masukan dan saran senantiasa kami harapkan demi perbaikan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 Dinas Sosial Kota Pontianak. Semoga Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2026 ini dapat menjadi masukan bagi semua pihak dan dapat direalisasikan sesuai rencana.

Pontianak, Agustus 2025

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar Belakang.....	I-1
1.2 Landasan Hukum.....	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	I-5
1.4 Sistematika Penulisan.....	I-5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU.....	II-1
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra.....	II-1
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan.....	II-34
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi.....	II-44
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD.....	II-51
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	II-60
BAB III TUJUAN DAN SASARAN.....	III-1
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional.....	III-1
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja.....	III-4
3.3 Program dan Kegiatan.....	III-8
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN.....	IV-1
4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Pontianak.....	IV-1
BAB V PENUTUP.....	V-I

DAFTAR TABEL

TABEL 2.1 REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK SAMPAI DENGAN TAHUN 2025.....	II-3
TABEL 2.2 PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK.....	II-35
TABEL 2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026 KOTA PONTIANAK	II-53
TABEL 2.4 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2026 KOTA PONTIANAK.....	II-62
TABEL 3.1 DAFTAR RENCANA AKSI DAN SUB KEGIATAN PENGAMPU TAHUN 2026.....	III-11
TABEL 3.2 SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK TAHUN 2026.....	III-15
TABEL 4.1 RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK TAHUN 2026.....	IV-2

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan mengacu pada Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, maka Perangkat Daerah wajib membuat Dokumen Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2026.

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Renja Perangkat Daerah disusun oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renja Perangkat Daerah digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Provinsi dan APBN.

Dokumen Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, tahapan persiapan meliputi pembentukan tim penyusunan RKPD dan Renja Perangkat Daerah, orientasi mengenai RKPD dan Renja Perangkat Daerah, penyusunan agenda kerja, serta penyiapan data dan informasi. Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah yang definitif.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi yang ada pada Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Perangkat Daerah. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman dilingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah pada tahun anggaran berkenaan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2026 adalah :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756).
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2002-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700).

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056).
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322).
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402).
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114).

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Tahun 1781).
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419).
16. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 868).
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 550).
18. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 117).
19. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 192).
20. Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 3).
21. Peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tanggal 28 Desember 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 131).
22. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Pontianak Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2023 Nomor 5).
23. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor , Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor).

- 24. Peraturan Wali Kota Pontianak Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 10).
- 25. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050- 5889 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- 26. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2026 disusun dengan maksud melaksanakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Sedangkan tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2026 adalah menyelaraskan dokumen Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah serta dengan dokumen perencanaan lain termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pontianak Tahun 2025-2029 agar penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang sosial berjalan sesuai koridor. Penyelarasan dilakukan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis, kebijakan nasional, regulasi yang berlaku dan saran dan/atau masukan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).

1.4 Sistematika Penulisan

Penulisan Rencana Kerja Perubahan ini dengan sistematika meliputi:

- BAB I PENDAHULUAN
- BAB II HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU
- BAB III TUJUAN DAN SASARAN
- BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
- BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

Penyusunan Renja Tahun 2026 merupakan tahun pertama dari renstra perangkat daerah periode 2025-2029. Untuk itu, pengisian Tabel TC. 29 lebih diarahkan pada pengisian Urusan, Bidang Urusan, Sasaran, Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan beserta indikator dan targetnya di akhir tahun renstra (2026) dan target pada tahun berjalan (2025).

Beberapa kali perubahan regulasi tentang nomenklatur program, kegiatan, sub kegiatan, dan satuannya menjadi salah satu kendala dalam penghitungan realisasi dan capaian. Misalnya setelah menetapkan indikator dan satuan pada saat penyusunan dokumen renstra, ternyata tahun berikutnya keluar aturan baru yang mewajibkan perubahan pada indikator dan satuan. Akibatnya terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan evaluasi.

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 sudah mengacu kepada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024.

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi dan pelayanan prima, Dinas Sosial Kota Pontianak mengoptimalkan pelayanan publik guna mewujudkan lembaga yang komunikatif dalam memberikan pelayanan publik yang prima melalui berbagai bantuan kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Demi mengoptimalkan pelayanan, Dinas Sosial Kota Pontianak membuat komitmen pelayanan EMPATI (Energik, Melayani, Profesional, Adaptif, Terdepan dan Integrasi) diwujudkan dengan :

- a. Menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan.
- b. Memberikan pelayanan sesuai kewajiban.
- c. Memberikan pelayanan yang ramah, sopan, tepat dan cepat
- d. Melayani sepenuh hati tanpa pamrih.
- e. Bekerja profesional sesuai dengan peraturan.

Tujuan yang dirumuskan Dinas Sosial Kota Pontianak dalam menyelaraskan dengan RPJMD Kota Pontianak yaitu Menurunnya Kemiskinan.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025-2029 sebanyak 2 (dua) sasaran, yaitu :

1. Meningkatnya Produktivitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

2. Meningkatnya Pelayanan Perlindungan dan Jaminan sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).

Berangkat dari sasaran tersebut kinerja yang akan dicapai dalam periode tahun 2025-2029 adalah sesuai dengan target indikator capaian kinerja yang telah ditetapkan, dimana hasil capaian tersebut menunjukkan nilai kuantitatif yang harus dicapai selama tahun 2025-2029.

Review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja pada Dinas Sosial Tahun 2023 (N-3) dan capaian pada tahun 2024, dapat tergambar pada Anggaran dan Realisasi APBD pada tahun yang bersangkutan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak tahun lalu bertujuan untuk mengetahui capaian sasaran-sasaran yang diinginkan, Dinas Sosial Kota Pontianak telah menyusun anggaran dan melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang diperlukan sesuai dengan target kinerja yang disepakati bersama. Adapun Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas Sosial Kota Pontianak dan Pencapaian Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak sampai dengan Tahun 2024 dapat dilihat dengan tabel sebagai berikut :

TABEL II.1 (T-C.29).
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL KOTA
PONTIANAK DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK
SAMPAI DENGAN TAHUN 2025

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN			
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1	URUSAN PEMERINTAH AN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.06	URUSAN PEMERINTAH AN BIDANG SOSIAL															
1.06.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Keseekretarit an	95	Persen		Persen	95	Persen	167	Persen	176,1	100	Persen	167	Persen	167%
1.06.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100	Persen		Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%
1.06.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen		Dokumen	8	Dokumen	8	Dokumen	100	8	Dokumen	16	Dokumen	67%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	2	Dokumen	67%
1.06.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen		Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	4	Dokumen	67%
1.06.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24	Laporan		Laporan	8	Laporan	8	Laporan	100	8	Laporan	16	Laporan	67%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	15	Laporan		Laporan	5	Laporan	5	Laporan	100	5	Laporan	10	Laporan	67%
1.6.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100	Persen		Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%
1.6.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	81	Orang		Orang	28	Orang	28	Orang	100	34	Orang	34	Orang	42%
1.6.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	36	Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	12	Dokumen	24	Dokumen	67%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.6.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/S emesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	54	Laporan		Laporan	18	Laporan	18	Laporan	100	18	Laporan	36	Laporan	67%
1.06.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100	Persen		Persen	100	Persen	100	Persen	100	100	Persen	100	Persen	100%
1.06.01.2.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	2	Dokumen	67%
1.06.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100	Persen		Persen	100	Persen	77	Persen	77	100	Persen	77	Persen	77%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah paket Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapan	210	Paket		Paket	70	Paket	108	Paket	154,3	70	Paket	178	Paket	85%
1.06.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Perundangan	15	Orang		Orang	3	Orang	0	Orang	0	5	Orang	5	Orang	33%
1.06.01.2.6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100	Persen		Persen	100	Persen	110	Persen	110	100	Persen	110	Persen	110%
1.06.01.2.6.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	36	Paket		Paket	12	Paket	12	Paket	100	12	Paket	24	Paket	67%
1.06.01.2.6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	36	Paket		Paket	12	Paket	12	Paket	100	12	Paket	24	Paket	67%
1.06.01.2.6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	36	Paket		Paket	12	Paket	12	Paket	100	12	Paket	24	Paket	67%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.01.2.6.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	36	Dokumen		Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100	12	Dokumen	24	Dokumen	67%
1.06.01.2.6.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	36	Laporan		Laporan	-	Laporan	-	Laporan	0	12	Laporan	12	Laporan	33%
1.06.01.2.6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggara an rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	96	Laporan		Laporan	34	Laporan	55	Laporan	161,76	34	Laporan	89	Laporan	93%
1.06.01.2.6.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen dukungan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	36	Dokumen		Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	12	Dokumen	13	Dokumen	36%
1.06.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	Persen		Persen	100	Persen	600	Persen	600	100	Persen	600	Persen	600%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	39	Unit		Unit	13	Unit	78	Unit	600	13	Unit	91	Unit	233%
1.06.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Lainnya	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	Persen		Persen	100	Persen	103	Persen	103	100	Persen	103	Persen	103%
1.06.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	36	Laporan		Laporan	-	Laporan	-	Laporan	-	12	Laporan	12	Laporan	33%
1.06.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	36	Laporan		Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	24	Laporan	67%
1.06.01.2.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	6	Laporan		Laporan	2	Laporan	2	Laporan	100	2	Laporan	4	Laporan	67%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	36	Laporan		Laporan	12	Laporan	13	Laporan	108,3	12	Laporan	25	Laporan	69%
1.06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah	100	Persen		Persen	100	Persen	167	Persen	167	100	Persen	167	Persen	167%
1.06.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	9	Unit		Unit	9	Unit	9	Unit	100	12	Unit	12	Unit	133%
1.06.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	100	Unit		Unit	100	Unit	100	Unit	100	100	Unit	200	Unit	200%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.01.2.09.0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang dipelihara/ Rehabilitasi	3	Unit		Unit	1	Unit	3	Unit	300	1	Unit	3	Unit	100%
1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYA AN SOSIAL	Persentase tingkat keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100	Persen		Persen	100	Persen	77	Persen	77	100	Persen	77	Persen	77%
1.06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam Daerah Kabupaten/ Kota	100	Persen		Persen	100	Persen	20	Persen	20	100	Persen	20	Persen	20%
1.06.02.2.02.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	60	Dokumen		Dokumen	20	Dokumen	5	Dokumen	25	20	Dokumen	25	Dokumen	42%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase pelaksanaan pengembang an PSKS	100	Persen		Persen	100	Persen	133	Persen	133	100	Persen	133	Persen	133%
1.06.02.2.03.0001	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas Pekersja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	60	Orang		Orang	20	Orang	19	Orang	95	50	Orang	69	Orang	115%
1.06.02.2.03.0002	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Kabupaten/ Kota yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	126	Orang		Orang	42	Orang	41	Orang	97,62	42	Orang	42	Orang	33%
1.06.02.2.03.0003	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	111	Keluarga		Keluarga	59	Keluarga	134	Keluarga	227,1	27	Keluarga	161	Keluarga	145%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	21	Lembaga		Lembaga	8	Lembaga	9	Lembaga	112,5	7	Lembaga	9	Lembaga	42,86%
1.06.02.2.03.0005	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan penguatan lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah sertifikat dari hasil peningkatan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Konsultasi Keluarga (LK3) Kewenangan Kabupaten/ Kota	60	Sertifikat		Sertifikat	-	Sertifikat	-	Sertifikat	-	20	Sertifikat	20	Sertifikat	33%
1.06.03	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	100	Persen		Persen	100	Persen	20	Persen	20	100	Persen	20	Persen	20%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.03.2.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Persentase pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari titik debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota le Desa/ Kelurahan asal	100	Persen		Persen	100	Persen	20	Persen	20	100	Persen	20	Persen	20%
1.06.03.2.01.0001	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Warga Negara Migran Korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal kewenangan Kabupaten/ Kota	15	Orang		Orang	5	Orang	1	Orang	20	5	Orang	6	Orang	40%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Penyandang Masalah Kesejahtera an Sosial yang mendapat kan layanan rehabilitasi kesejahtera an sosial	100	Persen		Persen	100	Persen	124	Persen	124	100	Persen	124	Persen	124%
1.06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar,Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	100	Persen		Persen	100	Persen	260	Persen	260	100	Persen	260	Persen	260%
1.06.04.2.01.0001	Penyediaan Permakanan	Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanan sesuai dengan standar gizi minimal kewenangan Kabupaten/ Kota	23.385	Orang		Orang	7895	Orang	7428	Orang	94,1	7795	Orang	15223	Orang	65%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.04.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/ Kota	900	Orang		Orang	300	Orang	300	Orang	100	300	Orang	600	Orang	67%
1.06.04.2.01.0003	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/ Kota	15	Orang		Orang	5	Orang	58	Orang	1160	50	Orang	108	Orang	720%
1.06.04.2.01.0004	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	120	Orang		Orang	40	Orang	97	Orang	242,5	40	Orang	137	Orang	114%
1.06.04.2.01.0005	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial kewenangan Kabupaten/ Kota	150	Orang		Orang	50	Orang	148	Orang	296	50	Orang	198	Orang	132%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)	
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.04.2.01.0006	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah peserta bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	300	Orang		Orang	100	Orang	280	Orang	280	100	Orang	380	Orang	127%
1.06.04.2.01.0007	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah dan Kartu Identitas	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk Kependuduk an, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	120	Orang		Orang	40	Orang	24	Orang	60	40	Orang	64	Orang	53%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.04.2.01.0008	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan kesehatan dasar kewenangan Kabupaten/ Kota	180	Orang		Orang	60	Orang	73	Orang	121,67	60	Orang	133	Orang	74%
1.06.04.2.01.0009	Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/ Kota	600	Orang		Orang	200	Orang	337	Orang	168,5	200	Orang	537	Orang	90%
1.06.04.2.01.0010	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan Kabupaten/ Kota	30	Orang		Orang	10	Orang	7	Orang	70	10	Orang	17	Orang	57%
1.06.04.2.01.0011	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penulusuran keluarga kewenangan Kabupaten/ Kota	120	Orang		Orang	40	Orang	95	Orang	237,5	40	Orang	135	Orang	113%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.04.2.01.0012	Pemberian Pelayanan Rujukan	Jumlah orang mendapatkan layanan rujukan kewenangan Kabupaten/ Kota	240	Orang		Orang	80	Orang	228	Orang	285	80	Orang	308	Orang	128%
1.06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti	100	Persen		Persen	100	Persen	119	Persen	119	100	Persen	119	Persen	119%
1.06.04.2.02.0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/ Kota	900	Orang		Orang	300	Orang	315	Orang	105	300	Orang	615	Orang	68%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.04.2.02.0008	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyanggah masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah peserta dalam pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA kewenangan Kabupaten/ Kota	150	Orang		Orang	50	Orang	103	Orang	206	50	Orang	153	Orang	102%
1.06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase penerima bantuan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	100	Persen		Persen	100	Persen	133	Persen	133	100	Persen	133	Persen	133%
1.06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase data fakir miskin warga Kota Pontianak yang diperbaharui	100	Persen		Persen	100	Persen	133	Persen	133	100	Persen	133	Persen	133%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.05.2.02.0001	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah fakir miskin cakupan daerah Kabupaten/ Kota yang didata	120.000	Orang		Orang	40.000	Orang	47.322	Orang	118,3	40.000	Orang	87.322	Orang	73%
1.06.05.2.02.0002	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/ Kota	60.000	Keluarga		Keluarga	20.000	Keluarga	40.106	Keluarga	200,5	20.000	Keluarga	60.106	Keluarga	100%
1.06.05.2.02.0003	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	30.000	Keluarga		Keluarga	10.000	Keluarga	11.342	Keluarga	113,42	10.000	Keluarga	21.342	Keluarga	71%
1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan Pengembang an Ekonomi Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	300	Orang		Orang	120	Orang	51	Orang	43	100	Orang	43	Orang	74%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial	100	Persen		Persen	100	Persen	215	Persen	215	100	Persen	215	Persen	215%
1.06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/ Kota	100	Persen		Persen	100	Persen	141	Persen	141	100	Persen	141	Persen	141%
1.06.06.2.01.0001	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (pengungsian) kewenangan Kabupaten/ Kota	1050	Orang		Orang	350	Orang	323	Orang	92,29	350	Orang	673	Orang	64%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.06.2.01.0002	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pada masa tanggap darurat (pengungsian) dan pasca bencana kewenangan Kabupaten/ Kota	600	Orang		Orang	200	Orang	338	Orang	169	200	Orang	538	Orang	90%
1.06.06.2.01.0003	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan Kabupaten/ Kota	300	Unit		Unit	100	Unit	161	Unit	161	100	Unit	261	Unit	87%
1.06.06.2.01.0004	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/ Kota	120	Orang		Orang	40	Orang	24	Orang	60	40	Orang	64	Orang	53%

KODE	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROGRAM/KEGIATAN/S UB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN / SUB KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM (RENSTRA PERANGKAT DAERAH) TAHUN 2024-2026		REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D DENGAN TAHUN 2023		TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN LALU (2024)					TARGET PROGRAM,KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025		PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN BERJALAN		
							TARGET RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024		TINGKAT REALISASI (%)			REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN S/D TAHUN 2025		TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA (%)
1	2	3	4		5		6		7		8=(7/6)	9		10=(5+7+9)		11=(10/4)
1.06.06.2.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikosisial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/ Kota	36	Orang		Orang	12	Orang	27	Orang	225	12	Orang	39	Orang	108%
1.06.06.2.02	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/ Kota	Persentase penyelenggara an pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/ Kota	100	Persen		Persen	100	Persen	288	Persen	288	100	Persen	288	Persen	288%
1.06.06.2.02.0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah Orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana kewenangan Kabupaten/ Kota	150	Orang		Orang	50	Orang	144	Orang	288	50	Orang	194	Orang	129%

Dari Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil review terhadap evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Sosial Tahun 2024 bahwa sejalan dengan visi, misi dan arah kebijakan umum APBD tahun 2024, alokasi anggaran keseluruhan Dinas Sosial Kota Pontianak mencapai Rp. 15.447.851.952,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 14.576.047.081,00 atau 94,36%.

Berdasarkan rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, ada beberapa hal yang perlu disesuaikan targetnya untuk perencanaan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

- a. Pada subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN pada tahun 2024 terdapat 27 orang ASN yang ada di Dinas Sosial Kota Pontianak. Pada tahun 2025 jumlah ASN bertambah menjadi 34 orang ASN yang terdiri dari 28 orang PNS dan 6 Orang PPPK.
- b. Pada subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada tahun 2024 ditargetkan sebanyak 9 unit. Dengan adanya hibah kendaraan dari Sekretariat Kota Pontianak dan hibah dari Kementerian Sosial, target bertambah menjadi 12 Unit.
- c. Pada subkegiatan Penyediaan Alat Bantu pada tahun 2026 ditargetkan sebanyak 50 orang yang mendapatkan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan karena pada tahun 2025 permintaan untuk penyediaan alat bantu bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial melebihi target dan terealisasi sebanyak 58 Orang.
- d. Masih perlu penyesuaian target pada sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan. Realisasi pada tahun 2024 sebanyak 11.342 Keluarga yang mana realisasi tersebut merupakan realisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH sehingga perlu dilakukan analisa terhadap kebutuhan KPM penerima bantuan sosial. Setelah dilakukan evaluasi, penerima Bantian Sosial Kesejahteraan APBD sebanyak 4.312 Orang untuk tahun 2026.

Berdasarkan rekapitulasi hasil pelaksanaan Renja tahun sebelumnya tersebut diatas pula, dilakukan analisa program/kegiatan/sub kegiatan serta faktor penyebab tidak tercapainya atau melebihi target kinerja sebagai berikut :

1. Analisa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja
 - a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah capaian kinerja target 77% dikarenakan sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan tidak dilaksanakan. Anggaran untuk sub kegiatan tersebut dilakukan refocusing akibat tidak adanya kegiatan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan yang khusus untuk ASN dan Non ASN dilingkungan Dinas Sosial Kota Pontianak.

b. Program Pemberdayaan Sosial

- Kegiatan Pengumpulan Sumbangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 20% dikarenakan sub kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang dan Barang capaian kinerja 20%. Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang terealisasi sebanyak 4 (empat) dokumen dari target 20 dokumen. Perencanaan awal setiap pelaku usaha yang akan melaksanakan kegiatan penerbitan undian gratis berhadiah wajib untuk mendapatkan rekomendasi dari Dinas Sosial Kota Pontianak dalam rangka tertib administrasi. Hanya 4 (empat) pelaku usaha yang mengajukan izin untuk pelaksanaan kegiatan undian gratis berhadiah. Dari hasil evaluasi tersebut perlu untuk dilakukan sosialisasi kegiatan tersebut kepada para pelaku usaha selain dalam rangka tertib administrasi juga agar tertib dalam pelaksanaan kegiatan undian gratis berhadiah agar tidak terjadi hal-hal yang menyulitkan masyarakat.
- Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota capaian kinerja 133% namun terdapat sub kegiatan yang tidak mencapai 100% yaitu Peningkatan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dari target kinerja 20 Orang terealisasi 19 Orang dikarenakan jumlah Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) yang aktif hanya 19 Orang sehingga perlu untuk mencari pengganti dari PSM yang tidak aktif. Kemudian pada sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang tercatat 42 Orang namun yang aktif hanya 41 Orang sehingga perlu untuk dilakukan evaluasi kinerja TKSK serta analisa kebutuhan pelayanan kepada masyarakat.

c. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

- Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan asal capaian kinerja 20% dengan memulangkan 1 (satu) orang warga migran korban tindak kekerasan sesuai laporan ke titik embarkasi di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Target sub kegiatan

ini tidak dapat diprediksi karena pelayanan dilakukan sesuai dengan laporan yang disampaikan.

d. Program Rehabilitasi Sosial

- Sub kegiatan Penyediaan Permakanan capaian kinerja 95% dikarenakan anggaran untuk sub kegiatan ini ditambah dalam rangka pelaksanaan razia pengamen yang ada di lampu lalu lintas di lingkungan Kota Pontianak. Namun karena jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang membutuhkan layanan tidak dapat diprediksi jumlahnya sehingga capaian kinerja mencapai 95%. Pelaksanaan sub kegiatan Penyediaan Permakanan dilaksanakan sesuai dengan jumlah PPKS yang terdata.
- Sub kegiatan fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak capaian kinerja 60% dikarenakan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil memiliki target kinerja untuk mendata masyarakat Kota Pontianak secara menyeluruh sehingga Dinas Sosial Kota Pontianak membantu untuk pendataan kependudukan bagi PPKS yang terlantar dan belum memiliki identitas kependudukan.
- Sub Kegiatan Layanan Kedaruratan realisasi kinerja 70% dikarenakan pada sub kegiatan ini dilaksanakan tindaklanjut untuk mayat terlantar yang ditemukan selama tahun 2024.

e. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Pada sub kegiatan Fasilitasi bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat capaian kinerja 43% dengan realisasi Jumlah orang mendapatkan bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat sebanyak 51 Orang dari target 120 Orang. Pelaksanaan sub kegiatan ini dilaksanakan pertama kali pada tahun 2024 sehingga masih perlu evaluasi. Bantuan pengembangan ekonomi masyarakat diberikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang memiliki usaha. Sebagai bahan evaluasi pada tahun 2025 dan selanjutnya bantuan akan diberikan juga kepada masyarakat miskin yang memiliki usaha dan belum mendapatkan bantuan sosial apapun.

f. Program Penanganan Bencana

- Pada tahun 2024 keluarga yang tertimpa bencana kebakaran, puting beliung, dan bencana angin kencang sebanyak 327 Orang. Pada sub kegiatan penyediaan permakanan realisasi kinerja 57% atau 201 korban bencana yang mendapatkan bantuan dari target 350 orang. Pemberian permakanan diberikan kepada korban bencana yang terdampak bencana

kebakaran 100% bencana puting beliung dan bencana angin kencang yang menyebabkan korban bencana membutuhkan bantuan makanan 3x1 hari setelah bencana selama 7 (tujuh) hari.

- Pada sub kegiatan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan capaian kinerja 78% atau 31 korban bencana yang tergolong lanjut usia, ibu hamil dan menyusui, balita dan disabilitas yang terdampak bencana.

2. Analisa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Telah Memenuhi Target Kinerja

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah telah memenuhi target kinerja karena merupakan kegiatan rutin pada Dinas Sosial Kota Pontianak.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah telah memenuhi target kinerja dengan pelaksanaan pemberian gaji dan tunjangan kepada 28 orang ASN, pelaksanaan verifikasi keuangan selama 12 bulan serta penyusunan 18 laporan keuangan bulanan/ triwulan dan semesteran Dinas Sosial Kota Pontianak.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah telah memenuhi target kinerja dengan melakukan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahunan.

b. Program Rehabilitasi Sosial

- Sub kegiatan penyediaan sandang telah memenuhi target kinerja dengan melakukan pemberian alat bantu berupa kursi roda, tongkat, hand kruk, tongkat kaki tiga dan alat bantu dengar kepada 300 Orang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disabilitas dan lanjut usia terlantar yang membutuhkan.

3. Analisa Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Melebihi Target Kinerja

a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan capaian kinerja 162% atau 55 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan Kementerian Sosial serta laporan pengantaran ODGJ ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat di Singkawang. ODGJ yang diantar ke Rumah Sakit Jiwa Provinsi Kalimantan Barat adalah ODGJ dengan kategori berat yang perlu penanganan khusus.
- Sub kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya dengan capaian kinerja 600% atau pengadaan 78 unit peralatan dan mesin yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan dari target pengadaan 10 unit peralatan mesin

lainnya berupa komputer unit, peralatan komputer, mesin pendingin, dan peralatan mesin lainnya pendukung kegiatan kantor.

- Sub kegiatan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor dengan capaian kinerja 108% atau 13 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor dari target 12 laporan.
- Sub kegiatan Pemeliharaan rehabilitasi gudang kantor dan bangunan lainnya dengan capaian kinerja 300% atau 3 (tiga) unit gedung yang direnovasi yaitu gedung kantor Dinas Sosial Kota Pontianak, PLAT dan UPRS.

b. Program Pemberdayaan Sosial

- Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 227% atau 134 PPKS yang mendapatkan pelatihan berupa pelatihan satpam 50 orang mengikuti pelatihan satpam, 24 orang mengikuti pelatihan menjahit, 20 orang mengikuti pelatihan membuat sendal hotel sederhana, dan 40 orang mengikuti pelatihan payet.

c. Program Rehabilitasi Sosial

- Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis diluar Panti Sosial dengan capaian kinerja 258% dikarenakan terdapat tambahan Dana Insentif Daerah pada penyediaan alat bantu.
- Jumlah PPKS yang membutuhkan bantuan tidak dapat diprediksi. Faktor yang menambah banyaknya PPKS yang membutuhkan bantuan rehabilitasi sosial dasar adalah karena kurangnya pendidikan, kurangnya pendapatan keluarga sehingga menyebabkan banyaknya gelandangan dan pengemis, terjadinya eksplositasi anak dan lanjut usia serta migrasi penduduk dari luar Kota Pontianak yang membutuhkan pekerjaan.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

- Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian kinerja 144% dikarenakan terdapat 47.322 jumlah fakir miskin di Kota Pontianak yang terdata. 40.106 keluarga diantaranya belum mendapatkan bantuan apapun yang merupakan pendataan dari seluruh Kelurahan di Kota Pontianak. 11.341 Keluarga merupakan Keluarga yang mendapatkan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) yang terdata pada tahun 2024.

- e. Program Penanganan Bencana
 - Pada sub kegiatan penyediaan sandang capaian kinerja 169% atau 338 orang mendapatkan bantuan sandang. Diantaranya terdapat anak usia sekolah yang menjadi korban bencana kebakaran yang diberikan seragam sekolah.
 - Dalam rangka peningkatan tanggap bencana pada masyarakat, Dinas Sosial Kota Pontianak berhasil memberikan sosialisasi kepada 144 siswa sekolah melalui kegiatan "Tagana Masuk Sekolah".
- 4. Kebijakan Perencanaan dan Penganggaran dalam rangka Mengatasi Faktor-Faktor Penyebab Kegagalan

Dalam rangka penyusunan perencanaan dan penganggaran yang tepat sasaran, perlu dilaksanakan evaluasi kinerja secara berkala. Penyusunan perencanaan berdasarkan evaluasi pada tahun sebelumnya serta memperhatikan isu-isu strategis terkini yang menjadi pemicu kemiskinan. Adapun kebijakan dan strategi yang diperlukan adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Pontianak.
2. Peningkatan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS).
3. Peningkatan identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana.
4. Bekerjasama dengan Perangkat Daerah dan Lembaga non Pemerintah dalam rangka pengentasan kemiskinan, pelayanan masyarakat dan mitigasi bencana.

Dapat digambarkan juga pada tabel berikut :

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pelayanan PPKS yang Optimal	1. Meningkatnya Produktivitas PSKS	1.1. Meningkatkan dan mendayagunakan segenap potensi dan sumber – sumber kesejahteraan sosial untuk peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	1.1. Optimalisasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Pontianak. 1.2. Penyelenggaraan beragam program belajar seperti diklat, mentorship, dan kesempatan penguatan kapasitas individu lainnya, seperti workshop, motivational events, tugas belajar. 1.3. Mendorong perumusan kebijakan pengembangan kompetensi yang adaptif 1.4. Memperkuat kapasitas lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial melalui akreditasi dan pembinaan serta pengawasan berkelanjutan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	2. Meningkatnya pelayanan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi PPKS	2.1. Meningkatkan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pendukung lainnya. 2.2. Melaksanakan rehabilitasi sosial dasar. 2.3. Meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana. 2.4. Peningkatan Ketepatan sasaran bantuan sosial krusial untuk efektivitas pengentasan kemiskinan, membutuhkan data akurat dan distribusi transparan di berbagai kelompok pendapatan.	1.1. Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 1.2. Peningkatan identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana. 1.3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi kesejahteraan sosial untuk menjamin ketersediaan pengelolaan data (aplikasi D'MASTER) 1.4. Melakukan pemeliharaan secara layak dan baik untuk menjamin sistem informasi kesejahteraan sosial yang memadai untuk memastikan integritas data 1.5. Membuka akses pemanfaatan data untuk mendukung program penyelenggaraan kesejahteraan sosial 1.6. Meningkatkan kapasitas SDM teknologi informasi dan petugas di daerah dalam mengelola data

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		2.5. Penyediaan pelayanan pendidikan fakir miskin melalui Sekolah Rakyat	1. Pendirian dan penyelenggaraan sekolah berasrama bagi peserta didik di jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas; 2. Penyelenggaran pendidikan Sekolah Rakyat yang mengikuti kurikulum nasional yang berlaku, dengan memenuhi delapan standar pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta aturan turunannya; 3. memberikan layanan bagi anak usia sekolah yang belum dan/atau putus/lulusan terutama yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin dengan memperhatikan informasi pada DTSEN untuk memasuki satuan pendidikan yang setara dan/atau lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas; 4. Mengatur kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat, termasuk kebutuhan akan tenaga pendamping atau asisten pembelajaran bagi siswa dengan kebutuhan khusus; 5. Menyelenggarakan pendidikan berasrama yang mendepankan program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup pendidikan keagamaan, pengembangan akademik, life skills (soft skills-hard skills), memupuk wawasan kebangsaan, keindonesiaan dan wawasan global 6. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memastikan ketersediaan ruang kelas yang layak, peralatan belajar yang memadai, serta sarana dan prasarana pendukung lain yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan kenyamanan peserta didik. 7. Menyelenggarakan operasionalisasi satuan pendidikan Sekolah Rakyat agar berjalan secara efektif dan efisien serta memenuhi aturan terkait akuntabilitas dan transparansi 8. Memastikan kualitas pembelajaran dan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan melalui sistem penjaminan mutu

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

SPM diterapkan pada urusan wajib daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik daerah Provinsi maupun daerah Kabupaten/ Kota. Untuk urusan pemerintahan lainnya, daerah dapat mengembangkan dan menerapkan standar/ indikator kinerja.

Dalam penerapannya, SPM harus menjamin akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan dasar dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ukuran-ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah. Oleh karena itu baik dalam perencanaan maupun penganggaran wajib diperhatikan prinsip-prinsip SPM yaitu sederhana, konkrit, mudah diukur, terbuka, terjangkau dan dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai batas waktu pencapaian.

Dalam rangka mendukung tercapainya pelaksanaan program-program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di daerah diperlukan adanya pedoman yang dapat dijadikan acuan dasar bagi terwujudnya capaian kinerja Perangkat Daerah terhadap bidang atau urusan wajib yang menjadi tugas pokoknya sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang memberikan kewajiban kepada pemerintah daerah membuat dan menyusun Standar Pelayanan Minimal sesuai dengan urusan wajib yang merupakan kewenangannya.

Adapun Capaian Indikator Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Pontianak dan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak telah dilaksanakan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Renstra 2025-2029.

TABEL II.2 (T-C. 30.)
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
	Pelayanan PPKS yang Optimal					100%	100%	100%	100%	100%	100%	Indikator tujuan sesuai dengan Renstra
1	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial <u>Indikator :</u> Persentase Tingkat Keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Meningkatnya Penanganan Rehabilitasi Sosial <u>Indikator :</u> Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
	Meningkatnya Pemenuhan Kebutuhan Dasar <u>Indikator</u> : Persentase pemenuhan kebutuhan dasar KPM dan Korban Bencana Alam dan Sosial sesuai standar waktu			100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya diluar panti	✓	✓	100%	100%	100%	100%	248,69%		100%	100%	Terdapat perubahan pada rumus perhitungan LPPD. Capaian diatas 100% dikarenakan 1 (satu) orang PPKS dapat menerima pelayanan lebih dari 1 sesuai kebutuhan PPKS tersebut
	Jumlah layanan data dan pengaduan yang dimiliki		✓	200 Pengaduan	200 Pengaduan	200 Pengaduan	200 Pengaduan	337 Pengaduan		350 Pengaduan	350 Pengaduan	

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
	Jumlah data penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang untuk masuk dalam data terpadu FM dan OTM		✓	-	-	-	-	507 Orang		-	-	
	Jumlah Tim Reaksi Cepat yang dibentuk		✓	2 Tim	2 Tim	2 Tim	2 Tim	2 Tim		2 Tim	2 Tim	Tim Reaksi Cepat yang dibentuk di Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu : 1. Tim SLRT B'Desut 2. Tim Taruna Siaga Bencana
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar dan gepeng yang dijangkau		✓	-	-	-	-	647 Orang		460 Orang	460 Orang	
	Jumlah kendaraan roda empat yang akses khusus layanan kedaruratan yang dimiliki		✓	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	Kendaraan kedaruratan yang disediakan terdiri dari : 1. Ambulance 2. Mobil Operasional 3. Mobil RTU (<i>Rescue Tactical Unit</i>)

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket permakanaan sesuai standar gizi		✓	7795 Orang	7795 Orang	7795 Orang	7795 Orang	225 Orang		7795 Orang	7795 Orang	Realisasi capaian tahun 2024 sudah sesuai dengan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan permakanaan
	Jumlah rumah singgah/shelter/ tempat tinggal sementara yang dimiliki sesuai standar		✓	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit		2 Unit	2 Unit	Rumah singgah yang ada di Dinas Sosial Kota Pontianak, yaitu : 1. Unit Pelayanan Rehabilitasi Sosial (UPRS) 2. PLAT
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar lanjut usia terlantar dan gepeng yang menerima paket sandang		✓	300 Orang	300 Orang	300 Orang	300 Orang	225 Orang		300 Orang	300 Orang	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan alat bantu		✓	5 Orang	5 Orang	5 Orang	5 Orang	58 Orang		5 Orang	5 Orang	Capaian tahun 2024 lebih tinggi dari target dikarenakan banyaknya permintaan pengadaan alat bantu sesuai dengan kebutuhan penyandang disabilitas dan lansia

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
	Jumlah alat bantu yang tersedia di rumah singgah/shelter		✓	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	
	Jumlah paket perbekalan kesehatan yang tersedia		✓	11 Paket	11 Paket	11 Paket	11 Paket	-		11 Paket	11 Paket	Paket perbekalan kesehatan pada tahun 2024 tidak dapat direalisasikan karena bukan merupakan kewenangan Dinas Sosial Kota Pontianak
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang memanfaatkan paket perbekalan kesehatan		✓	11 Orang	11 Orang	11 Orang	11 Orang	43 Orang		11 Orang	11 Orang	
	Jumlah tenaga kesehatan yang disediakan di rumah singgah		✓	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang	2 Orang		2 Orang	2 Orang	
	Jumlah pekerja sosial profesional dan/atau TKS dan/atau relawan sosial yang disediakan		✓	37 Orang	37 Orang	37 Orang	37 Orang	36 Orang		37 Orang	37 Orang	Pekerja Sosial yang ada pada Dinas Sosial Kota Pontianak, yaitu : 1. 30 Orang Pekerja Sosial Kemensos 2. 6 Orang TKSK di Kecamatan

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan bimbingan fisik, mental dan sosial sesuai standar di keluarga, masyarakat, Dinas Sosial, Rumah Singgah/Shelter dan/atau pusat kesejahteraan sosial		✓	100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	148 Orang		100 Orang	100 Orang	
	Jumlah bimbingan sosial yang dillaksanakan kepada keluarga dan masyarakat		✓	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang difasilitasi untuk mendapatkan dokumen kependudukan		✓	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	24 Orang		40 Orang	40 Orang	

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan akses layanan pendidikan dan kesehatan dasar		✓	60 Orang	60 Orang	60 Orang	60 Orang	73 Orang		60 Orang	60 Orang	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang mendapatkan layanan penelusuran keluarga		✓	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	95 Orang		50 Orang	50 Orang	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang direunifikasi dengan keluarga		✓	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	97 Orang		60 Orang	60 Orang	

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
	Jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gepeng yang dirujuk		✓	80 Orang	80 Orang	80 Orang	80 Orang	228 Orang		100 Orang	115 Orang	
2.	Persentase korban bencana alam yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	✓	✓	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%	
	Jumlah korban bencana yang mendapatkan makanan		✓	350 Orang	350 Orang	350 Orang	350 Orang	201 Orang		350 Orang	350 Orang	
	Jumlah korban bencana yang menerima paket sandang		✓	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	338 Orang		200 Orang	200 Orang	
	Jumlah tempat penampungan pengungsi yang dimiliki		✓	100 Unit	100 Unit	100 Unit	100 Unit	104 Unit		100 Unit	100 Unit	Indikator ini realisasinya berbentuk penyerahan barang kepada korban bencana berupa terpal

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026	TAHUN 2027	
	jumlah paket permakanaan khusus bagi kelompok rentan		✓	31 Orang	40 Orang	40 Orang	40 Orang	31 Orang		40 Orang	40 Orang	Kelompok yang menjadi sasaran penanganan khusus adalah : 1. Kelompok Lansia 2. Kelompok Ibu yang sedang mengandung dan menyusui 3. Kelompok bayi dan balita 4. Kelompok disabilitas Pada Tahun 2024 realisasi sudah sesuai dengan indikator
	Jumlah korban bencana yang menerima pelayanan dukungan psikososial		✓	12 Orang	12 Orang	12 Orang	12 Orang	16 Orang		12 Orang	12 Orang	Target pelaksanaan layanan dukungan psikososial sesuai dengan jumlah korban bencana yang terdampak
	Jumlah pekerja sosial Profesional/tenaga kesejahteraan sosial dan/atau relawan sosial yang tersedia		✓	62 Orang	62 Orang	62 Orang	62 Orang	62 Orang		62 Orang	62 Orang	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokratis.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dan masyarakat dimasa mendatang. Isu strategis juga diartikan sebagai kondisi/ kejadian penting/ keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya akan menghilangkan peluang apabila tidak dimanfaatkan. Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis diperlukan analisis terhadap berbagai fakta dan informasi kunci yang telah diidentifikasi untuk dipilih menjadi isu strategis.

Dalam menentukan data atau informasi yang akan dijadikan isu strategis dilakukan dengan memperhatikan kriteria sebagai berikut :

1. Memiliki pengaruh yang besar/ signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
3. Luasnya dampak yang ditimbulkan terhadap publik;
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk dikelola.

- A. Tingkat Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak dan Hal Kritis yang terkait dengan Pelayanan.

Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Wali kota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Sosial. Setelah dilakukan evaluasi terhadap berbagai isu-isu strategis, maka yang menjadi isu strategis Dinas Sosial Kota Pontianak dalam hal pelayanan adalah :

1. Kemiskinan
 - a. Kurangnya lapangan pekerjaan.
 - b. Tingkat pendidikan (SDM) rendah.
 - c. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan bantuan sosial.
 - d. Penerima bantuan sosial masih belum tepat sasaran.
2. Anak Terlantar dan lanjut usia terlantar
 - a. Pemenuhan kebutuhan dasar anak terlantar dan lanjut usia terlantar.
 - b. Orang terlantar sering datang dari luar daerah Kota Pontianak.
 - c. Koordinasi dengan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.
3. Penyandang Disabilitas
 - a. Peningkatan cakupan pelayanan terhadap penyandang disabilitas.
 - b. Peningkatan penyediaan alat bantu bagi penyandang disabilitas, sehingga memerlukan bantuan sosial dari Kementrian dan APBD.
 - c. Memfasilitasi akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.
4. Gelandangan dan pengemis
 - a. Tingkat kemiskinan.
 - b. Buruknya kondisi sosial ekonomi.
 - c. Kurangnya kesempatan kerja.
 - d. Kurangnya pendidikan sehingga membuat Sumber Daya Manusia (SDM) rendah.
5. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial

Ketepatan sasaran bantuan sosial krusial untuk efektivitas pengentasan kemiskinan, membutuhkan data akurat dan distribusi transparan di berbagai kelompok pendapatan.
6. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Pendamping kesejahteraan sosial krusial untuk efektivitas program, namun diperlukan peningkatan kompetensi secara berkala dan mekanisme monitoring yang valid agar pendampingan lebih optimal.

Pengaruh dari isu tersebut adalah menyebabkan tingkat kriminalitas tinggi dan peningkatan penyalahgunaan narkoba.

B. Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak

Berdasarkan Perda tersebut, maka keluarlah peraturan Walikota Pontianak Nomor 131 Tahun 2021 tentang Kedudukan Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun peraturan dimaksud dapat digambarkan Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Tugas Pokok

Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan di bidang Sosial.

2. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Sosial Kota Pontianak mempunyai fungsi yang meliputi :

- a. Perumusan Kebijakan di Bidang Sosial
- b. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Sosial
- c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Sosial
- d. Pelaksanaan Administrasi Dinas Sosial
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Sosial

Secara umum isu-isu penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat daerah yang berdasarkan kajian hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 yaitu dalam upaya pencapaian Indikator Kinerja ditetapkan strategi sebagai berikut:

1. Untuk tahun anggaran berikutnya, dalam perencanaan untuk penentuan besaran anggaran harus disesuaikan dengan output kegiatan yang dihasilkan sehingga sisa anggaran atau pun kurang terserapnya anggaran dapat diminimalisir.
 2. Komitmen yang tinggi dari Dinas Sosial Kota Pontianak untuk mengurangi angka kemiskinan dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Kota Pontianak.
 3. Melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelum anggaran disahkan, agar tepat waktu dan tepat sasaran sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dalam DPA.
 4. Untuk pengesahan DPPA agar sesuai dan tepat waktu sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan perubahan anggaran yang telah ditetapkan.
- C. Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/ internasional.

Bank Dunia dalam laporannya berjudul *Indonesia Poverty Assessment : Pathways Towards Economic Security* yang dirilis pada awal bulan Mei 2023 menyebutkan bahwa Indonesia dinilai berhasil dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan ekstrem, dimana kemiskinan ekstrem di Indonesia per Maret 2022 sebanyak 1,5% dari jumlah penduduk. Meskipun angka ini sedikit berbeda dengan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2022 yakni 2,04% tetapi hal tersebut tetap menunjukkan bahwa upaya penurunan kemiskinan ekstrem di Indonesia mengalami kemajuan dari angka 2,14% di tahun 2021.

Untuk mencapai target angka kemiskinan 0% pada 2024, Presiden Republik Indonesia meminta seluruh pihak terkait agar terus melakukan konvergensi, integrasi, dan peningkatan kualitas pelaksanaan berbagai program penanggulangan kemiskinan ekstrem dengan memanfaatkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, dibuat formulasi isu-isu penting untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2025 sebagai berikut :

Permasalahan dan Isu Strategis sesuai Tupoksi Dinas Sosial Kota

Pontianak

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK	PERMASALAHAN DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK	ISU KLHS YANG RELEVAN	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Tingkat kemiskinan	1. Peningkatan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat 2. Pengentasan Kemiskinan 3. Pengurangan Kemiskinan	Tujuan SDG's Tahun 2030 yaitu TPB 1 Tanpa Kemiskinan dan TPB 10 Berkurangnya Kesenjangan	1. Target kemiskinan dibawah 4,5%-5% 2. Sinergi Antar Pemerintah dan Non Pemerintah 3. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial 4. Standar Pelayanan Minimal (SPM) 5. <i>Care Economy</i> 6. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 7. Kelemahan Monitoring dan Evaluasi 8. <i>Heavy Empowerment</i> 9. Mitigasi Kerentanan Sosial 10. Ketergantungan Akan Bantuan Sosial 11. Manajemen Kementerian Sosial 12. Sekolah Rakyat 13. Efektivitas Penggunaan Belanja Anggaran	Pembangunan IKN memperbesar kesempatan kerja	1. Kemiskinan 2. Anak Terlantar 3. Penyandang Disabilitas 4. Lanjut Usia Terlantar 5. Ketepatan Sasaran Penerima Bantuan Sosial 6. Penguatan Kapasitas SDM dan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Adapun gambaran pencapaian visi dan misi Daerah terhadap capaian program nasional adalah sebagai berikut :

Visi : **“Maju. Sejahtera, Berwawasan Lingkungan dan Humanis”**

Misi 4 : Mewujudkan Perekonomian yang Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif

TUJUAN KOTA	SASARAN KOTA	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) KOTA		TUJUAN SKPD	INDIKATOR TUJUAN SKPD	TARGET CAPAIAN							SASARAN SKPD	INDIKATOR SASARAN SKPD	TARGET CAPAIAN						
		URAIAN IKU	SATUAN			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030			SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang merata dan berdaya saing	Tingkat Kemiskinan	- Tingkat Kedalaman Kemiskinan	%	Pelayanan PPKS yang Optimal	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	%	100	100	100	100	100	100	Meningkatnya Produktivitas PSKS	Persentase peningkatan kemampuan PSKS	%	100	100	100	100	100	100
		- Tingkat Keparahan Kemiskinan	%										Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar dan jaminan soial PPKS							

D. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan Dinas Sosial Kota Pontianak

Untuk menunjang kinerja Dinas Sosial Kota Pontianak hal-hal yang perlu diperhatikan adalah dengan melakukan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas pokok dan fungsi. Hasil identifikasi permasalahan tugas pokok dan fungsi dilakukan melalui Analisis SWOT, analisa strategi yang diuraikan adalah sebagai berikut :

<u>Strengths (S)</u> • Komitmen Kepala Daerah • Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan PPKS • Kerjasama dengan Pekerja Sosial yang ada di Kelurahan dan Kecamatan. • Tersedianya regulasi yang mengatur pembagian kewenangan masing-masing perangkat daerah dalam hal penanganan PPKS. • Telah terbentuknya Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) di Kelurahan. • Memiliki Pilar Sosial di seluruh Kelurahan • Adanya Inovasi dalam pelayanan • Tersedianya anggaran • Bantuan sosial	<u>Weakness (W)</u> • Kompetensi dan keterampilan Sumber Daya Manusia yang belum maksimal • Kepedulian masyarakat terkait masalah sosial masih kurang • Data PPKS belum valid dan up to date. • Pemberian bantuan sosial di masyarakat belum terintegrasi dengan optimal, masih dilakukan pada masing-masing organisasi baik pemerintah maupun swasta • Pemberian bantuan sosial belum tepat sasaran • Tidak mendapatkan akses DTKS dari Kementerian Sosial.
<u>Opportunities (O)</u> • Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kerja. • Produk hukum yang memadai. • Dukungan kerjasama para pemangku kepentingan. • Dukungan dari pekerja sosial. • Dukungan instansi vertikal.	<u>Threads (T)</u> • Database Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) belum lengkap. • Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap masalah sosial. • Sikap apatis individu terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). • PMKS yang sulit diatur. • Pembagian kewenangan SPM Provinsi dan Kabupaten/Kota belum dijalankan dengan maksimal

E. Pemetaan Permasalahan untuk penentuan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tingkat Kemiskinan	Kemiskinan	a. Kurangnya lapangan pekerjaan b. Tingkat pendidikan (SDM) rendah c. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan Bantuan Sosial d. Kementerian Sosial tidak menyampaikan DTKS yang update secara lengkap
		Anak Terlantar	a. Pemenuhan kebutuhan dasar keluarga tidak terpenuhi sehingga menjadi gelandangan dan pengemis b. Keterbatasan wewenang Dinas Sosial Kota Pontianak dalam penanganan Anak Terlantar
		Penyandang Disabilitas	a. Minim akses pelayanan publik bagi penyandang disabilitas
		Lanjut Usia Terlantar	a. Keterbatasan informasi bagi lanjut usia terlantar
		Penguatan Kapasitas SDM	a. Pendamping kesejahteraan sosial yang perlu peningkatan kompetensi dan mekanisme monitoring yang valid agar pendampingan lebih optimal
		Ketepatan Sasaran Penerima Bansos	a. Diperlukan data akurat dan distribusi bansos yang transparan

Dalam hal penyelesaian isu-isu penting diatas perlu untuk dilakukan evaluasi pencapaian tahun sebelumnya dan verifikasi serta validasi data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara berkala sehingga program dan kegiatan yang berkaitan dengan pelayanan dapat terlaksana dengan maksimal dan sesuai ketentuan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari rancangan awal yang telah disusun pada Dinas Sosial telah disesuaikan dengan perencanaan Bappeda. Perencanaan kerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Sosial Dan Kota Pontianak, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak. Di samping itu, dokumen rencana kerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta

kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen Rencana Kerja (Renja) ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Sosial Kota Pontianak.

TABEL II.3 (T-C. 31)
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026
KOTA PONTIANAK

DINAS SOSIAL

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Pontianak	Persentase Tingkat Keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%	2.112.465.700,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Kota Pontianak	Persentase Tingkat Keaktifan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial	100%	2.612.465.700,00	
	Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ Kota	100%	20.000.000,00	Pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/ Kota	100%	20.000.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Kota Pontianak	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	1 dokumen	20.000.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	Kota Pontianak	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	1 dokumen	20.000.000	
	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS	100%	2.092.465.700,00	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan pengembangan PSKS	100%	2.592.465.700,00	
	Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Bimbingan Teknis	62 Orang	942.465.700	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat kewenangan Kabupaten/ Kota	62 Orang	942.465.700	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah keluarga yang mengikuti kapasitas kewenangan Kabupaten/ Kota	50 Keluarga	1.000.000.000,00	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah keluarga yang mengikuti kapasitas kewenangan Kabupaten/ Kota	100 Keluarga	1.500.000.000	Bedasarkan realisasi tahun 2024 : Pelatihan satpam : 50 Orang Pelatihan Menjahit : 24 Orang Pelatihan Membuat sendal : 20 Orang Pelatihan Memayet : 40 Orang Pelatihan ini menjadi penting untuk meningkatkan kapasitas Kepala keluarga kurang mampu untuk meningkatkan ekonomi dari hasil pelatihan yang dilakukan
	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Kesejahteraan yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	7 Lembaga	150.000.000	Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak	Jumlah Lembaga Kesejahteraan yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/ Kota	30 Lembaga	150.000.000	Peningkatan kapasitas lembaga- lembaga dibawah pengawasan Dinas Sosial Kota Pontianak

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kota Pontianak	(%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	10.000.000	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Kota Pontianak	(%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	10.000.000	
	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debakasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Pontianak	% pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dan titik debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota ke Des/ Kelurahan asal	100%	10.000.000	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debakasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Pontianak	% pemulangan Warga Negara Migran korban tindak kekerasan dan titik debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota ke Des/ Kelurahan asal	100%	10.000.000	
	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debakasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Pontianak	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal kewenangan Kabupaten/ Kota	5 orang	10.000.000	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debakasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Kota Pontianak	Jumlah Warga Negara Migran korban tindak kekerasan yang dipulangkan dari titik debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/ Kelurahan asal kewenangan Kabupaten/ Kota	5 orang	10.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Pontianak	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	1.200.250.400,00	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Kota Pontianak	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	100%	1.580.250.400,00	
	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	1.027.095.200	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	100%	1.407.095.200	
	Penyediaan Permakanan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minumal Kewenagan Kabupaten/Koita	200 orang	550.000.000	Penyediaan Permakanan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minumal Kewenagan Kabupaten/Koita	200 orang	550.000.000,00	
	Penyediaan Sandang	Kota Pontianak	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	150.000.000	Penyediaan Sandang	Kota Pontianak	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	300 orang	150.000.000	
	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	5 orang	120.000.000,00	Penyediaan Alat Bantu	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	500.000.000,00	Penambahan jumlah disabilitas dan lanjut usia yang membutuhkan alat bantu

	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	4.980.000	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	40 orang	4.980.000	
--	--	----------------	--	----------	-----------	--	----------------	--	----------	-----------	--

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Pontianak	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	30.000.000	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Kota Pontianak	Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	30.000.000	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	48.575.200	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	100 orang	48.575.200	
	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kota Pontianak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	40 orang	5.000.000	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Kota Pontianak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	20 orang	5.000.000	Target disamakan dengan tahun 2023
	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	60 orang	14.980.000	Pemberian Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	60 orang	14.980.000	
	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/ Kota	200 orang	61.580.000	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/ Kota	200 orang	61.580.000	
	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	10 orang	31.980.000	Pemberian Layanan Kedaruratan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	10 orang	31.980.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	40 orang	5.000.000	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	40 orang	5.000.000	
	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	80 orang	5.000.000	Pemberian Layanan Rujukan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan kewenangan kabupaten/kota	80 orang	5.000.000	
	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti	100%	173.155.200,00	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/ AIDS dan NAPZA di luar panti	100%	173.155.200,00	
	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	15.000.000	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Kota Pontianak	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	100 Orang	15.000.000	
	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	37.175.200	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Kota Pontianak	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	300 Orang	37.175.200	
	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Pontianak	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	120.980.000	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA	Kota Pontianak	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	50 orang	120.980.000	
3	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Pontianak	% Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	100%	3.759.380.700,00	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Kota Pontianak	% Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM)	100%	3.759.380.700,00	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase Data fakir miskin warga Kota Pontianak yang diperbaharui	100%	3.759.380.700,00	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase Data fakir miskin warga Kota Pontianak yang diperbaharui	100%	3.759.380.700,00	

	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	40.000 orang	450.000.000	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	40.000 orang	450.000.000	
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan	20.000 Usulan	34.980.000	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	20.000 keluarga	34.980.000	
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	4.312 keluarga	2.896.301.200	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Kota Pontianak	Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	4.312 keluarga	2.896.301.200	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penerima Bansos APBD
	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kKabupaten/Kota	100 orang	378.099.500	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Kota Pontianak	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kKabupaten/Kota	100 orang	378.099.500	
4	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Pontianak	% Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100%	410.680.600,00	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Kota Pontianak	% Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	100%	410.680.600,00	
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial Kabupaten/ kota	100%	382.450.000,00	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Kota Pontianak	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan bencana sosial Kabupaten/ kota	100%	382.450.000,00	
	Penyediaan Makanan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	142.090.000	Penyediaan Makanan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	350 orang	142.090.000	
	Penyediaan Sandang	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pasca masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	159.225.000	Penyediaan Sandang	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pasca masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	200 orang	159.225.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Pontianak	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	100 unit	20.000.000	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Kota Pontianak	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	100 unit	20.000.000	
	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok Rentan kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Orang	31.135.000	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Kota Pontianak	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi Kelompok Rentan kewenangan Kabupaten/ Kota	4 Orang	31.135.000	
	Pelayanan Dukungan Psikosisial	Kota Pontianak	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	30.000.000	Pelayanan Dukungan Psikosisial	Kota Pontianak	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	12 orang	30.000.000	
	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Kota Pontianak	Persentase korban bencana yang dievaluasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat	100%	28.230.600	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Kota Pontianak	Persentase korban bencana yang dievaluasi dengan menggunakan sarana dan prasarana tanggap darurat	100%	28.230.600	
	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Pontianak	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	28.230.600	Koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Kota Pontianak	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi, sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	28.230.600	
5	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Pontianak	% Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesektariatan	100%	8.329.361.877,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Kota Pontianak	% Tingkat Kepuasan Bidang Terhadap Pelayanan Kesektariatan	100%	8.529.361.877,00	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	56.250.000,00	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pelaksanaan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	100%	56.250.000,00	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	56.250.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	56.250.000,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	6.000.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen	7.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	15.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5 laporan	15.000.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	10 Laporan	23.125.000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	10 Laporan	23.125.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	5.808.579.277,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	5.808.579.277,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPД					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/bulan	5.518.259.277	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Pontianak	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	34 Orang/bulan	5.518.259.277	Penambahan jumlah ASN, 32 orang PNS dan 3 orang PPPK
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	275.400.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Pontianak	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian/ verifikasi keuangan SKPD	12 Dokumen	275.400.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	18 Laporan	14.920.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulan/ semesteran SKPD	18 Laporan	14.920.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.500.000,00	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada Perangkat Daerah	100%	2.500.000,00	
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kota Pontianak	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	1 Dokumen	2.500.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	87.620.000,00	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	100%	87.620.000,00	
	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Kota Pontianak	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta atribut Perlengkapannya	70 paket	42.620.000	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Kota Pontianak	Jumlah paket Pakaian Dinas Beserta atribut Perlengkapannya	70 paket	42.620.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	45.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Kota Pontianak	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang	45.000.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	483.226.050,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemenuhan administrasi umum Perangkat Daerah	100%	483.226.050,00	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	29.839.950	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah paket komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	29.839.950	
	Penyediaan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	120.000.000	Penyediaan Logistik Kantor	Kota Pontianak	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	4 paket	120.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	80.886.100	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Pontianak	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	80.886.100	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.500.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Kota Pontianak	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	12 dokumen	2.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pontianak	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	5.000.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kota Pontianak	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	1 laporan	5.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 laporan	200.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Pontianak	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40 laporan	200.000.000	
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kota Pontianak	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen	50.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	200.000.000,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%	200.000.000,00	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	200.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	25 Unit	200.000.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.321.056.550,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Kota Pontianak	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1.321.056.550,00	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	12.000.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	222.327.350	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	222.327.350	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	20.000.000	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan	55.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.066.729.200	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Pontianak	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 laporan	1.066.729.200	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	370.130.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Pontianak	Persentase pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	370.130.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dians Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	159.120.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kota Pontianak	Jumlah Kendaraan Dians Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	9 Unit	159.120.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	111.010.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit	111.010.000	

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					
	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Pontianak	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	3 Unit	300.000.000	Terdapat 3 gedung yang perlu dilakukan perawatan secara berkala yaitu : 1. Gedung kantor 2. PLAT 3. UPRS
JUMLAH					15.822.309.277	JUMLAH				16.902.139.277	

Dari tabel tersebut diatas terdapat 3 (tiga) sub kegiatan yang menjadi perhatian setelah proses analisis kebutuhan dengan rancangan awal RKPD sebagai berikut :

1. Pada subkegiatan Peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota dianggarkan sebesar Rp. 1.000.000.000,00 dengan target 50 Keluarga. Subkegiatan ini dilakukan dengan memberikan pelatihan kepada masyarakat miskin yang ada di Kota Pontianak dalam rangka meningkatkan pendapatan keluarga dari hasil pelatihan yang telah dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tersebut pada tahun 2024, telah dilaksanakan pelatihan berupa pelatihan satpam yang diikuti oleh 50 orang, pelatihan menjahit bagi wanita rawan sosial yang diikuti oleh 24 orang, pelatihan membuat sendal hotel sederhana yang diikuti oleh 20 orang dan pelatihan membuat payet yang diikuti 40 orang. Total masyarakat yang telah mengikuti pelatihan tersebut sebanyak 134 orang, sehingga berdasarkan hasil tersebut, target untuk tahun 2026 menjadi 100 orang dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.500.000.000,00 yang digunakan untuk memberikan pelatihan kepada masyarakat miskin dan memberikan pendampingan kepada masyarakat yang telah mengikuti kegiatan tersebut hingga dapat berdaya dari hasil pelatihan yang sudah dilaksanakan dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat tersebut.
2. Pada subkegiatan Penyediaan alat bantu dianggarkan sebesar Rp. 120.000.000,00 dengan target 5 orang. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 600.4/2851/ST tentang Penetapan Target Jumlah Warga Negara dan Mutu Minimal Layanan Standar Pelayanan Minimal Daerah dikatakan bahwa target capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) ditetapkan dengan target jumlah warga negara dan perhitungan jumlah mutu minimal layanan sesuai hasil pembahasan dalam forum Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang). Dalam rangka meningkatkan mutu layanan dasar kepada Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) disabilitas dan lanjut usia, kebutuhan penyediaan alat bantu disediakan kepada disabilitas dan lanjut usia dari masyarakat kurang mampu yang sulit untuk mendapatkan alat bantu untuk memastikan bahwa setiap masyarakat terutama disabilitas dan lanjut usia kurang mampu dapat hidup layak.
3. Pada subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya dianggarkan sebesar Rp. 100.000.000,00 dengan target 1 (satu) unit gedung. Dinas Sosial Kota Pontianak memiliki 3 (tiga) unit gedung yang perlu untuk dilakukan pemeliharaan secara berkala yaitu, gedung kantor, PLAT dan UPRS. Prioritas pemeliharaan secara berkala pada gedung PLAT dan UPRS yang menjadi tempat penampungan sementara Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dirawat sebelum diserahkan ke panti yang ada di Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan gabungan antara usulan masyarakat dan rencana kerja Pemerintah Daerah setiap tahunnya yang disahkan

melalui rapat paripurna oleh DPRD. Usulan dari masyarakat ditampung dalam wadah Musrenbang yang terlebih dahulu dimulai dari Musrenbang tingkat Kelurahan sampai Musrenbang tingkat Kota. Hasil usulan Musrenbang digunakan sebagai bahan untuk menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan rancangan Renja dibahas dalam forum Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Bappeda. Tujuan pembahasan rancangan Renja adalah sinkronisasi dan penyelarasan program dan kegiatan serta penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan sebagai upaya dalam mensinergikan pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja Tahun 2026 Dinas Sosial Kota Pontianak untuk usulan program dan kegiatan yang bersumber dari masyarakat.

Tabel II.4 (T-C.32.)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Kota Pontianak

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan/Rincian Asmas dan Pokir	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran /Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Program Pemberdayaan Sosial	Kota Pontianak			
	Kegiatan Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak			
	Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota	Kota Pontianak			
1	Pelatihan Satpam Bagi Keluarga Tidak Mampu	RT. 05 RW. 04 Kel. Tambelan Sampit Kec. Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
2		Rw 01, Rw 02,Rw 03, Rw 04, Rw 05 Rw 06, Rw 07, Rw 08, Rw 09 Rw 10 Kel. Tanjung Hilir Kec. Pontianak	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	20 Orang	Diakomodir
3		Gg. Transmigrasi RT 2/RW 13 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Diakomodir
4		Gg. Analis RT. 5/RW. 15 Kel. Bangka Belitung Laut Kec. Pontianak Tenggara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Diakomodir
5		GG. SAMBAS JAYA RW.15 Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Tenggara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Diakomodir
6		Jl. Rajawali Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota 10 Orang	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	10 Orang	Diakomodir
7		RW 002 Kel. Siantan Tengah Kec. Pontianak Utara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Diakomodir
8		Jl. P. H. Husin II Gg. Masjid RT 002 RW 008 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Diakomodir
9		Jl. P. H. Husin II Komp. Pemda Jalur 3 RT 002 RW 008 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Diakomodir
10		Jl. P. H. Husin II Komp. Pemda Jalur 3 RT 002 RW 006 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Diakomodir
11		Jl. P. H. Husin II Komp. Pemda Jalur 3 RT 002 RW 006 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Diakomodir
12		Jl. P. H. Husin II Komp. Pemda Jalur 3 RT 002 RW 006 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Diakomodir

13		Wilayah Kelurahan Saigon Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
14		Kelurahan Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	15 Orang	Diakomodir
15		Wilayah RW 18 Kel. Tanjung Hulu Kec. Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	36 Orang	Diakomodir
16		Wilayah Kel. Dalam Bugis Kec. Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
17		lingkungan RW.06,RW.15,RW.8,R W.25 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	84 Orang	Diakomodir
18		Jl. Tanjung Harapan RW 5 Kel. Banjar Serasan Kec. Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
19		Wilayah Kel.Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
20		Wilayah Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Diakomodir
21		Jl. Alianyang No. 1b (Kantor Lurah) ,RW. 008 /RT 001 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	77 Orang	Diakomodir
22		RW . 008, RW .004, RW. 001, RW. 007 Kel. Tengah Kec. Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
23	Pelatihan Menjahit Bagi Keluarga Tidak Mampu	JALAN KHATULISTIWA KM. 4,5 KANTOR LURAH BATULAYANG Kel. Batu Layang Kec. Pontianak Utara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
24		RW.15.RW.06,RW.24, RW.8 Kel. Sungai Beliang Kec. Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	30 Orang	Diakomodir
25		Jl. Rajawali Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan	20 Orang	Diakomodir
26		Gg. Teluk Sahang II RW 003 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
27		Gg. Teluk Betung 3 RW 022 Kel. Siantan Hilir Kec. Pontianak Utara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir

28		Wilayah Kelurahan Saigon Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
29		Gg. Fajar Jl. Tanjungpura RT 3 RW 2 Kel. Benua Melayu Laut Kec. Pontianak Selatan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
30		Wilayah Kelurahan Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	17 Orang	Diakomodir
31		Jalan Tanjung Harapan RT 1 RW 8 Kel. Banjar Serasan Kec. Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
32		Jalan Tanjung Harapan RW 5 Kel. Banjar Serasan Kec. Pontianak Timur	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
33		Wilayah Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
34		JL. IMAM BONJOL GG. MENDAWAI I RT 002 RW 004 Kel. Bansir Laut Kec. Pontianak Tenggara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Diakomodir
35		Wilayah Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Diakomodir
36		Wilayah RT.04 RW.06 Kel. Darat Sekip Kec. Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
37		Jl. Alianyang No. 1b (Kantor Lurah) RW.008 /RT001 Kel. Sungai Bangkong Kec. Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	150 Orang	Diakomodir
38		RW . 008, RW .004, RW. 001, RW. 007 Kel. Tengah Kec. Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
39		Wilayah Kel. Tengah Kec. Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
40	Pelatihan Pembuatan Sandal Hotel Bagi Keluarga Tidak Mampu	Jl. Rajawali Kel. Mariana Kec. Pontianak Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	22 Orang	Diakomodir
41		RT.001 - RW.019 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir
42		RW 024 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	12 Orang	Diakomodir

43		Jl. P. H. Husin II Komp. Pemda Jalur 3 RT 002 RW 006 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Diakomodir
44		Jl. P. H. Husin II Komp. Pemda Jalur 3 RT 002 RW 006 Kel. Bansir Darat Kec. Pontianak Tenggara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	1 Orang	Diakomodir
45		Wilayah Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Diakomodir
46		RT.004 RW.014 Kel. Parit Tokaya Kec. Pontianak Selatan	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota		Diakomodir

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan dan strategi disusun sebagai pendekatan dalam memecahkan permasalahan yang mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tahun 2025-2029, serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran nasional dan sasaran strategis Kementerian Sosial. Arah kebijakan dan strategi nasional yang tercantum dalam RPJMN 2025-2029, merupakan acuan dalam menyusun kebijakan pembangunan kesejahteraan sosial dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, arah kebijakan dan strategi yang dituangkan ke dalam Renstra Kementerian Sosial 2025-2029 dibagi menjadi 2 (dua) bagian. Pertama adalah arah kebijakan dan strategi nasional yang merupakan penugasan RPJMN 2025-2029, dan kedua adalah arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial. Dalam rangka mempertajam arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial memerlukan regulasi yang efektif dan aplikatif untuk mencapai sasaran strategis tersebut, yang pada akhirnya mencapai sasaran nasional. Arah regulasi dan/atau kebutuhan regulasi berupa Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri Sosial dituangkan dalam kerangka regulasi Kementerian Sosial 2025-2029. Selanjutnya, untuk mewujudkan efektivitas operasionalisasi pelaksanaan arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial, sesuai dengan kapasitas organisasi dan dukungan sumber daya aparatur sipil yang ada, perlu disusun kerangka kelembagaan. Kerangka kelembagaan merupakan perangkat Kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan ASN. Penjabaran lebih lanjut mengenai arah kebijakan dan strategi nasional, arah kebijakan dan strategi Kementerian Sosial, kerangka regulasi serta kerangka kelembagaan untuk mencapai sasaran strategis, tujuan, misi, dan visi periode 2025-2029 disajikan dalam penjelasan sebagai berikut. Arah Kebijakan Nasional. Uraian mengenai arah kebijakan dan strategi nasional dalam Renstra ini merupakan penugasan kepada Kementerian Sosial sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan tugas dan fungsinya. Kementerian Sosial bertanggung jawab dalam mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian prioritas Presiden, selain bertanggung jawab dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian Sosial. RPJMN 2025-2029 akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN, dimana pendapatan perkapita Indonesia akan mencapai tingkat kesejahteraan setara dengan negara-negara berpenghasilan menengah atas (upper-middle income country/MIC) yang memiliki

kondisi infrastruktur, kualitas SDM, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik Sesuai dengan RPJPN 2025-2045, sasaran pembangunan jangka menengah 2025-2029 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM yang berkualitas dan berdaya saing.

Kerangka kebijakan penanggulangan kemiskinan fokus pada penduduk golongan menengah kebawah yang semakin membutuhkan sistem perlindungan yang komprehensif, serta adanya potensi meningkatnya kesenjangan antar kelompok miskin dan non miskin yang menjadikan masalah sosial semakin kompleks. Guna mendukung pengentasan kemiskinan serta dalam rangka menghadapi permasalahan isu-isu strategis, maka dari itu dalam Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2025-2029 telah ditetapkan tujuan dan sasaran yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Kota Pontianak berdasarkan dari tujuan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029 dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029.

**Tujuan dan Sasaran Renstra Kementerian Sosial
Tahun 2025-2029**

Tujuan Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029	Sasaran Renstra Kementerian Sosial Tahun 2025-2029
1. Meningkatnya taraf kesejahteraan sosial masyarakat miskin dan rentan. 2. Tata kelola Kementerian Sosial yang agile, berkualitas dan efisien.	1. Sistem Kesejahteraan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan yang inklusif : • Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) • Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) untuk penduduk Lansia • Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) untuk Penyandang Disabilitas 2. Tata kelola kesejahteraan sosial yang berdampak Indeks Reformasi Birokrasi

Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran : Target	2025	2026	2027	2028	2029
Meningkatnya Kesejahteraan Sosial yang inklusif	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang meningkat kesejahteraannya					
	Indeks Pelayanan Publik (IPP)	4,15	4,2	4,25	4,3	4,35
Meningkatnya Partisipasi PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang berperan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial					
Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial					
Meningkatnya kemandirian bagi PPKS	Persentase PPKS yang mendapat penanganan peningkatan kemandirian					
Meningkatnya kualitas pelayanan perangkat daerah	NILAI IKM (Indeks Kepuasan Masyarakat)	91,2	91,6	92	92,3	92,7

Sasaran	Program	Indikator Program	2025	2026	2027	2028	2029
1. Meningkatkan Partisipasi PSKS dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan Sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial					
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Dalam Panti Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA					
		Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial					
		Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkatkan Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial					
	Penanganan Bencana	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana Provinsi pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar					

Sasaran	Program	Indikator Program	2025	2026	2027	2028	2029
2. Terpenuhinya Perlindungan dan Jaminan Sosial bagi PPKS	Rehabilitasi Sosial	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gelandang dan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya					
	Penanganan WNM KPO	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani					
	Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran	Program	Indikator Program	2025	2026	2027	2028	2029
3. Meningkatkan kemandirian bagi PPKS	Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar					
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi					
		Persentase Daerah yang Melaksanakan dan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin					
		Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan					
4. Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah	Penunjang Urusan Pemda	Nilai SAKIP					
	Pengelolaan TMP	Persentase Taman Makam Pahlawan yang dikelola					

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1-5 Tahun. Penetapan tujuan dalam Rencana Kerja didasarkan pada potensi dan permasalahan serta isu utama urusan Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun Tujuan Renstra 2025-2029 Dinas Sosial Kota Pontianak adalah sebagai berikut yaitu Pelayanan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang optimal.

Sasaran merupakan penjabaran tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/ dihasilkan secara nyata oleh Dinas Sosial Kota Pontianak. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik,terinci dapat terukur dan dapat dicapai. Adapun yang menjadi sasaran dalam Renstra 2025 - 2029 Dinas Sosial Kota Pontianak sebanyak 2 (dua) sasaran yaitu :

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target
	Pelayanan PPKS yang Optimal	Persentase PPKS yang mendapatkan pelayanan	Persen	100
1	Meningkatnya Produktivitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persentase peningkatan kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	Persen	100
2	Meningkatnya Pelayanan, Perlindungan, dan Jaminan Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Dasar dan jaminan sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persen	100

Sasaran organisasi yang ditetapkan pada dasarnya merupakan bagian dari proses perencanaan strategis dengan fokus utama berupa tindakan pengklasifikasi sumber daya organisasi ke dalam strategi organisasi. Guna memenuhi kriteria tersebut maka penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yaitu keterangan gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi.

Strategi untuk mencapai visi dan misi Dinas Sosial Kota Pontianak dihasilkan dari posisi Strategis hasil analisa lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan

bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Dari analisa lingkungan strategis yang telah dilakukan maka dapat strategi dan Kebijakan Dinas Sosial Kota Pontianak adalah:

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Pelayanan PPKS yang Optimal	1. Meningkatnya Produktivitas PSKS	1.1. Meningkatkan dan mendayagunakan segenap potensi dan sumber – sumber kesejahteraan sosial untuk peningkatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	1.1. Optimalisasi dan pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Pontianak. 1.2. Penyelenggaraan beragam program belajar seperti diklat, mentorship, dan kesempatan penguatan kapasitas individu lainnya, seperti workshop, motivational events, tugas belajar. 1.3. Mendorong perumusan kebijakan pengembangan kompetensi yang adaptif 1.4. Memperkuat kapasitas lembaga penyelenggara layanan kesejahteraan sosial melalui akreditasi dan pembinaan serta pengawasan berkelanjutan
	2. Meningkatnya pelayanan, perlindungan, dan jaminan sosial bagi PPKS	2.1. Meningkatkan kualitas penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar dan kebutuhan pendukung lainnya. 2.2. Melaksanakan rehabilitasi sosial dasar. 2.3. Meningkatkan kualitas pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana. 2.4. Peningkatan Ketepatan sasaran bantuan sosial krusial untuk efektivitas pengentasan kemiskinan,	1.1. Peningkatan penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. 1.2. Peningkatan identifikasi pemenuhan kebutuhan dasar Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan korban bencana. 1.3. Meningkatkan kualitas dan kapasitas sistem informasi kesejahteraan sosial untuk menjamin ketersediaan pengelolaan data (aplikasi D'MASTER)

		membutuhkan data akurat dan distribusi transparan di berbagai kelompok pendapatan. 2.5. Penyediaan pelayanan pendidikan fakir miskin melalui Sekolah Rakyat	1.4. Melakukan pemeliharaan secara layak dan baik untuk menjamin sistem informasi kesejahteraan sosial yang memadai untuk memastikan integritas data 1.5. Membuka akses pemanfaatan data untuk mendukung program penyelenggaraan kesejahteraan sosial 1.6. Meningkatkan kapasitas SDM teknologi informasi dan petugas di daerah dalam mengelola data 1.7. Pendirian dan penyelenggaraan sekolah berasrama bagi peserta didik di jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas; 1.8. Penyelenggaraan pendidikan Sekolah Rakyat yang mengikuti kurikulum nasional yang berlaku, dengan memenuhi delapan standar pendidikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan beserta aturan turunannya; 1.9. memberikan layanan bagi anak usia sekolah yang belum dan/atau putus/lulusan terutama yang berasal dari keluarga miskin ekstrem dan miskin dengan memperhatikan informasi pada DTSEN untuk memasuki satuan pendidikan yang setara dan/atau lebih tinggi secara tertib, terarah, dan berkualitas; 1.10. Mengatur kualifikasi dan kompetensi guru dan tenaga kependidikan yang akan ditempatkan di Sekolah Rakyat, termasuk kebutuhan akan tenaga pendamping atau asisten pembelajaran
--	--	---	--

			bagi siswa dengan kebutuhan khusus; 1.11. Menyelenggarakan pendidikan berasrama yang mendepankan program pendidikan yang komprehensif-holistik mencakup pendidikan keagamaan, pengembangan akademik, life skills (soft skills-hard skills), memupuk wawasan kebangsaan, keindonesiaan dan wawasan global 1.12. Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dengan memastikan ketersediaan ruang kelas yang layak, peralatan belajar yang memadai, serta sarana dan prasarana pendukung lain yang akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan kenyamanan peserta didik. 1.13. Menyelenggarakan operasionalisasi satuan pendidikan Sekolah Rakyat agar berjalan secara efektif dan efisien serta memenuhi aturan terkait akuntabilitas dan transparansi 1.14. Memastikan kualitas pembelajaran dan pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan melalui sistem penjaminan mutu
--	--	--	---

Kebijakan yang ditempuh untuk melaksanakan strategi ini dengan mengoptimalkan kewenangan untuk menggalang dukungan stakeholder, pekerja sosial dan instansi vertikal dalam penanganan PPKS, Menggalang lembaga sosial dan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat miskin. Pemberdayaan ekonomi PPKS melalui bimbingan usaha dan bantuan modal, melaksanakan pelatihan bagi PPKS, percepatan pelayanan dan pengaduan masalah data kemiskinan melalui sistem layanan rujukan terpadu.

3.3 Program dan Kegiatan

1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Rumusan Program, Kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Sosial Kota Pontianak sangat dipengaruhi perencanaan pembangunan daerah Kota Pontianak sehingga semua langkah-langkah yang disusun sejalan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Pontianak. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis yang berkembang.

Dinas Sosial memiliki tugas untuk memberikan pelayanan berupa Pelayanan Rehabilitasi Sosial dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang Sosial yaitu Penyandang Disabilitas Terlantar diluar Panti, Anak Terlantar diluar panti, lanjut usia terlantar diluar panti serta gelandang dan pengemis diluar panti, Pemberian Bantuan dan Jaminan Sosial, dengan urusan wajibnya yang merupakan SPM bidang sosial yaitu Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota dan pemberdayaan Sosial bagi masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan harkat dan martabat bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib, serta merujuk pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) Dinas Sosial tingkat Kota yang meliputi jenis pelayanan dasar terdiri atas Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti, Rehabilitasi Sosial Dasar bagi Lanjut Usia Terlantar, Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana Kabupaten/Kota.

Terdapat beberapa target sub kegiatan yang berbeda dengan dokumen Renstra yaitu sebagai berikut :

1. Sub Kegiatan penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN target dalam dokumen Renstra sebanyak 27 Orang sedangkan pada Renja target sebanyak 35 Orang dikarenakan jumlah ASN di Dinas Sosial pada tahun 2026 diperkirakan PNS sebanyak 32 Orang dan PPPK sebanyak 3 Orang.
2. Sub kegiatan penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan target dalam dokumen Renstra sebanyak 9 Unit kendaraan Dinas sedangkan pada Renja sebanyak 12 Unit kendaraan Dinas dikarenakan pada tahun 2024 terdapat penambahan

kendaraan Dinas berupa mobil sebanyak 3 unit termasuk kendaraan dinas yang dimutasikan ke Dinas Sosial Kota Pontianak.

3. Sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu target dalam dokumen Renstra sebanyak 5 Orang sedangkan target di Renja sebanyak 50 Orang dikarenakan adanya penambahan pagu anggaran untuk sub kegiatan tersebut.

Adapun rencana aksi yang dilakukan dalam pelaksanaan sub kegiatan di Dinas Sosial Kota Pontianak dapat digambarkan sebagai berikut :

- a. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 492.465.700,00 :

Rencana Aksi :

Melakukan pelatihan untuk Potensi Pekerja Sosial Masyarakat dibawah bimbingan Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu Pendamping Rehabilitas Sosial, Tim Penyelenggara Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT), dan anggota Tim Siaga Bencana.

- b. Sub Kegiatan Pembinaan Teknis Sumber Daya Manusia Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran Rp. 942.465.700,00 :

Rencana Aksi :

Melakukan pelatihan untuk Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan kewenangan Dinas Sosial Kota Pontianak, PSM, Fasilitator dan Pekerja Sosial Kewenangan Kabupaten/ Kota.

- c. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 1.000.000.000,00 :

Rencana Aksi :

- Membentuk tim untuk melakukan verifikasi dan validasi pada usulan nama keluarga yang akan diberikan pelatihan.
- Melakukan pelatihan satpam, pelatihan menjahit, pelatihan membuat sandal hotel, dan pelatihan memayet bagi warga kurang mampu yang terdaftar pada DTKS.

- d. Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan dengan anggaran Rp. 550.000.000,00 :

Rencana Aksi :

Memberikan makanan sesuai dengan standar gizi minimal kepada penghuni PLAT dan UPRS sebanyak 3 (tiga) kali sehari dan dianggarkan 1 (satu) tahun.

- e. Sub Kegiatan Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran Rp. 450.000.000,00. Sub Kegiatan ini mengakomodir Belanja Bantuan Sosial :

Rencana Aksi :

- Membentuk tim Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan Camat dan Lurah di lingkungan Kota Pontianak.
 - Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan SDM PKH, Fasilitator, Pekerja Sosial Masyarakat dan Puskesmas dengan melakukan verifikasi dan validasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Penerima PKH, dan Penerima Bansos BPNT.
- f. Sub Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan anggaran Rp. 2.896.301.200,00. Sub Kegiatan ini mengakomodir Belanja Bantuan Sosial : Rencana Aksi :
- Membentuk tim Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan Camat dan Lurah di lingkungan Kota Pontianak.
 - Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dengan melibatkan SDM PKH, Fasilitator, Pekerja Sosial Masyarakat dan Puskesmas dengan melakukan verifikasi dan validasi kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Penerima PKH, dan Penerima Bansos BPNT.
 - Melakukan verifikasi dan validasi pada usulan DTKS.
 - Anggaran bantuan sosial tunai kepada keluarga miskin yang belum masuk kedalam DTKS.
- g. Sub Kegiatan Fasilitasi Pengembangan Ekonomi Masyarakat dengan anggaran Rp. 378.099.500,00 : Rencana Aksi :
- Menugaskan Fasilitator, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Puskesmas untuk melakukan pendataan kepada keluarga calon penerima Bantuan Ekonomi Masyarakat agar tepat sasaran.

Rencana aksi pada sub kegiatan belanja prioritas lainnya digambarkan pada tabel di bawah ini :

Tabel III.1
Daftar Rencana Aksi dan Sub Kegiatan Pengampu
Tahun 2026

No	Sub Kegiatan	Rencana Aksi	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL						
Kegiatan Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota						
1	Koordinasi dan sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau barang	Melakukan sosialisasi Undian Gratis Berhadiah dengan Narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat	Rp20.000.000	1 Dokumen	Kota Pontianak	
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Membuat SK Tim Puskesmas SLRT 2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Kinerja Puskesmas SLRT 3. Melaksanakan Bimbingan Teknis/Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Puskesmas SLRT 4. Menyiapkan Laporan Monitoring dan Evaluasi Serta Laporan Kegiatan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi Peningkatan Kapasitas	Rp492.465.700	20 Orang	Kota Pontianak	
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Membuat SK Tim monitoring dan evaluasi atas Laporan PSKS 2. Melakukan monitoring dan evaluasi ke lapangan untuk mengetahui kinerja PSKS 3. Mengadakan Bimtek atau Sosialisasi untuk meningkatkan kapasitas kemampuan PSKS 4. Menyusun laporan monitoring dan evaluasi serta Bimtek atau Sosialisasi	Rp450.000.000	42 Orang	Kota Pontianak	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Rapat persiapan kriteria peserta Pelatihan Satpam 2. rapat persiapan penyelenggaraan kegiatan, Juknis peserta Pelatihan Satpam 3. membuat Surat tugas tim monev calon peserta pelatihan satpam 4. teknikal meeting, pengukuran tinggi badan dan Pretest peserta pelatihan satpam 5. membuat surat penetapan peserta pelatihan satpam 6. membuat surat tugas tim monev pelaksanaan kegiatan peltihan satpam 7. Melakukan seleksi pihak ketiga pelaksana kegiatan pelatihan satpam 8. Membuat perencanaan penyedia pelaksanaan pengadaan pakaian satpam dan kelengkapannya 9. evaluasi kegiatan Pelatihan Satpam dan pembuatan Laporan peserta pelatihan satpam 10. rapat persiapan kriteria peserta pelatihan menjahit 11. rapat persiapan penyelenggaraan kegiatan, juknis peserta pelatihan menjahit 12. membuat surat tugas tim monev calon peserta pelatihan menjahit 13. rapat persiapan monev peserta pelatihan menjahit 14. membuat surat permohonan kepada LKP yang dapat menyelenggarakan kegiatan pelatihan menjahit 15. membuat surat tugas instruktur/pengajar pelatihan menjahit 16. teknikal meeting peserta pelatihan menjahit 17. membuat rencana pelaksanaan pengadaan mesin jahit dan bahan pelatihan 18. membuat Surat keputusan peserta pelatihan menjahit 19. membuat surat petugas monitoring pelaksanaan pelatihan menjahit 20. evaluasi kegiatan menjahit	Rp400.000.000	27 Keluarga	Kota Pontianak	
5	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	1. Melakukan rapat/sosialisasi terkait pengembangan kelembagaan masyarakat dengan narasumber dari Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat 2. Melakukan monitoring dan evaluasi kepada lembaga masyarakat yang terdata di Dinas Sosial Kota Pontianak	Rp150.000.000	7 Lembaga	Kota Pontianak	
PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN						
Kegiatan Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal						
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	1. Rapat koordinasi terkait pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan ke daerah asal dan laporan Non SPM Bidang Rehsos 2. Fasilitasi pemulangan warga negara migran korban tindak kekerasan dari titik debarkasi di Kota Pontianak untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal 3. Rapat Monitoring dan Evaluasi Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke daerah asal 4. Perjalanan dinas digunakan untuk Pendamping Rehsos memulangkan warga negara migran korban tindak kekerasan ke daerah atau alamat asal	Rp10.000.000	5 Orang	Kota Pontianak	
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL						
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial						
1	Penyediaan Permakanan	1. Pemberian makanan sesuai dengan standar gizi kepada PPKS 2. Rapat Koordinasi Tim Pengadaan Barang / Jasa 3. Rapat Respon Kasus terhadap Penyandang	Rp550.000.000	200 Orang	Kota Pontianak	

		Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis 4. Penyaluran bantuan ATENSI di lapangan (6 kecamatan) 5. Honorarium diberikan untuk Pejabat Pengadaan Barang / Jasa 6. Monitoring dan Evaluasi program permakanaan PPKS, respon kasus dan penyaluran bantuan Atensi				
2	Penyediaan Sandang	1. Pemberian pakaian dan kelengkapan lainnya untuk penghuni PLAT dan UPRS 2. Honorarium diberikan untuk Pejabat Pengadaaan Barang / Jasa	Rp150.000.000	300 Orang	Kota Pontianak	
3	Penyediaan Alat Bantu	1. Pemberian alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan PPKS terdiri dari : kaki palsu, kursi roda dewasa, kursi roda disabilitas (khusus), walker (tongkat kaki empat), alat bantu dengar 2. Honorarium diberikan untuk Pejabat Pengadaaan Barang / Jasa	Rp120.000.000	5 Orang	Kota Pontianak	
4	Pemberian Reunifikasi Keluarga	1. Rapat Koordinasi Pendamping Rehsos, Petugas PLAT dan UPRS terkait reunifikasi keluarga PPKS terlantar 2. Pelayanan reunifikasi keluarga PPKS terlantar 3. rapat Monitoring dan Evaluasi kegiatan reunifikasi keluarga PPKS 4. Perjalanan dinas digunakan untuk pendamping Rehsos melaksanakan reunifikasi keluarga PPKS Terlantar ke kelurahan di 6 kecamatan sesuai alamat keluarga PPKS	Rp4.980.000	40 Orang	Kota Pontianak	
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1. Rapat koordinasi bersama pendamping Rehsos dan petugas PLAT dan UPRS terkait program bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada PPKS 2. Rapat koordinasi lintas sektoral selaku narasumber dan penyelenggara bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial (BNN, Balai Latihan Kerja, Psikolog dari LDAC, Psikiater dari UPT Alianyang) 3. Kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada PPKS lokasi di : PLAT dan UPRS, BNN, Balai Pelatihan Kerja 4. monitoring dan evaluasi pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 5. Biaya perjalanan dinas digunakan Pendamping Rehsos yang mendampingi PPKS untuk mengikuti kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di BNN, Balai Pelatihan Kerja, UPT Alianyang maupun Psikolog)	Rp30.000.000	50 Orang	Kota Pontianak	
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	1. Rapat koordinasi bersumber kegiatan dari Dinsos Kota Pontianak, UPT Alianyang dan Dinkes Kesehatan Kota Pontianak 2. Kegiatan pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di 2 lokasi kecamatan (Lokasi 1 : Kec. Pontianak Timur untuk sasaran Penyandang Disabilitas di Kec. Pontianak Timur dan Utara, Lokasi 2 : Kec. Pontianak Selatan untuk sasaran Lansia di Kec. Pontianak Selatan dan Pontiank Kota) 3. monitoring dan evaluasi pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial 4. Biaya perjalanan dinas digunakan untuk PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) mendampingi PPKS : Penyandang Disabilitas dan Lanjut Usia sesuai wilayah kerja untuk menghadiri kegiatan bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial di 2 lokasi kecamatan, kegiatan respon kasus SPM bidang Rehsos bagi pendamping Rehsos di 6 kecamatan	Rp48.575.200	100 Orang	Kota Pontianak	
7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	1. Rapat koordinasi terkait daftar dan kelengkapan persyaratan PPKS yang perlu layanan dokumen kependudukan (pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA) bersama petugas PLAT, UPRS dan Pendamping Rehsos 2. Fasilitasi pembuatan administrasi kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan Kartu Identitas Anak bagi penyandang disabilitas 3. Rapat monitoring dan evaluasi kegiatan fasilitasi pembuatan NIK, Akta Kelahiran, Surat Nikah dan KIA 4. Perjalanan Dinas digunakan Pendamping Rehsos untuk melengkapi berkas persyaratan ke kelurahan di 6 kecamatan, mendampingi PPKS ke Dinas Dukcapil	Rp5.000.000	40 Orang	Kota Pontianak	
8	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	1. Kegiatan pemberian Akses Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar berupa layanan kesehatan di Faskes dan perbekalan kesehatan, perlengkapan kebersihan rutin PMKS di PLAT dan UPRS 2. Biaya perjalanan dinas digunakan Pendamping Rehsos yang mendampingi PMKS untuk mendapatkan layanan kesehatan di FKTP Tk.1	Rp14.980.000	60 Orang	Kota Pontianak	

		Puskesmas sesuai wilayah kerja dan Faskes Rujukan : UPT Alianyang, RS Kota, RSUD Soedarso, RS Kartika Husada)				
9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	1. Pelayanan data dan pengaduan masyarakat 2. Rapat Koordinasi pembentukan Tim SPM 3. Rapat koordinasi terkait kinerja Tim SPM, monitoring dan evaluasi kegiatan layanan data dan pengaduan 4. Honorarium diberikan kepada sekretariat tim pelaksana SPM Bidang Rehsos, Tim Koordinasi SPM bidang Rehsos 5. Perjalanan dinas digunakan untuk Pendamping Rehsos / Non ASN pelayanan SPM penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis di 6 kecamatan	Rp61.580.000	200 Orang	Kota Pontianak	
10	Pemberian Layanan Kedaruratan	1. Rapat Koordinasi terkait penanganan kasus mayat terlantar 2. Penanganan mayat terlantar berupa fardhu kifayah / pemakaman jenazah oleh Tenaga Penanganan Sosial 3. Monitoring dan Evaluasi Penanganan mayat terlantar	Rp31.980.000	10 Orang	Kota Pontianak	
11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	1. Rapat Koordinasi Pendamping Rehsos, Petugas PLAT dan UPRS terkait penelusuran keluarga PPKS 2. Penelusuran keluarga PPKS 3. Rapat Monitoring dan Evaluasi kegiatan penelusuran keluarga PPKS 4. Perjalanan dinas digunakan untuk pendamping Rehsos melaksanakan penelusuran keluarga PPKS ke kelurahan di 6 kecamatan	Rp5.000.000	40 Orang	Kota Pontianak	
12	Pemberian Layanan Rujukan	1. Rapat Koordinasi terkait data layanan Rehsos rujukan PPKS dan laporan SPM Bidang Rehsos 2. Pelayanan rujukan untuk PPKS ke layanan Rehsos Lanjutan atau Faskes Lanjutan (UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia dan Rehabilitasi Penyandang Disabilitas Mulia Dharma, UPT Klinik Utama Alianyang, Lembaga atau Yayasan Sosial lainnya) 3. Perjalanan dinas untuk Non ASN termasuk Pendamping Rehsos membawa PPKS ke fasilitas layanan kesehatan maupun layanan rehsos lanjutan	Rp5.000.000	80 Orang	Kota Pontianak	
Kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial						
1	Penyediaan Perbekalan Kesehatan Di Luar Panti	Kegiatan pemberian Perbekalan Kesehatan di luar panti bagi PMKS berupa handsanitizer, handscoon / sarung tangan medis, alat test urin 7 parameter untuk narkoba, kasa steril, alkohol dan bethadine	Rp15.000.000	100 Orang	Kota Pontianak	
2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	1. Rapat Koordinasi Panitia kegiatan sosialisasi AMPFS (Anak Memerlukan Pengembangan Fungsi Sosial) dan Anak Dengan Kedisabilitasn (ADK) 2. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial kepada PPKS bukan korban HIV/NAPZA : sosialisasi AMPFS di 12 sekolah dan ABH di 6 kecamatan 3. Honorarium diberikan kepada Narasumber dari Dinas Sosial Kota Pontianak, Psikolog UPT LDAC, pendidik di lembaga / yayasan disabilitas 4. perjalanan dinas digunakan untuk Pendamping Rehsos / Non ASN melaksanakan kegiatan AMPFS di 12 sekolah dan pendampingan ABH di 6 kecamatan	Rp37.175.200	300 Orang	Kota Pontianak	
3	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	1. Rapat Koordinasi Tim Pelaksana Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza 2. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga PPKS bukan korban HIV/NAPZA 3. Honorarium diberikan untuk Tim Pelaksana Rehsos PMKS lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan Napza 4. Perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk Pendamping Rehsos/ Non ASN mendampingi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH)	Rp120.980.000	50 Orang	Kota Pontianak	
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL						
Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota						
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Rapat pembentukan tim Pengelola DTKS 2. Rapat koordinasi dengan petugas verval 3. Rapat evaluasi petugas verval 4. rapat koordinasi tim pengelola DTKS 5. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan digunakan untuk konsumsi petugas verval yang turun ke lapangan, serta petugas untuk melakukan monev 6. Honorarium tim pelaksana kegiatan untuk tim Pengelola DTKS 7. Belanja Jasa Tenaga Operator digunakan untuk pembayaran honor operator aplikasi SIKS.NG yang ada dinas sosial dan di 29 kelurahan 8. Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain digunakan untuk pembayaran	Rp450.000.000	40000 Orang	Kota Pontianak	

		petugas verbal DTKS dan PBI				
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	1. Belanja ATK digunakan untuk kegiatan bimbingan teknis penginputan pada aplikasi SIKS.NG 2. Belanja Makanan dan Minuman Rapat digunakan untuk rapat persiapan dan pelaksanaan bimtek dan rapat internal bidang Banjamsos , serta rapat evaluasi pengelolaan data fakir miskin. 3. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan digunakan untuk petugas melakukan monitoring 4. Belanja Narasumber digunakan utk honor narsum kegiatan bimtek SIKS.NG.	Rp34.980.000	20000 Usulan	Kota Pontianak	
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	1. Belanja ATK digunakan kegiatan bansos tunai 2025 2. Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain berupa pengadaan pakaian batik tradisonal untuk pendamping PKH 3. Belanja Makanan dan Minuman Rapat digunakan untuk rapat persiapan pembentukan tim bansos Tunai, rapat koordinasi dengan pendamping PKH , Rapat evaluasi penyaluran bansos tunai 4. Belanja makanan dan minuman aktivitas lapangan digunakan untuk petugas ke lapangan dalam rangka pembukaan rekening bank kalbar dan penyaluran bansos tunai untuk penerima bantuan 5. Honorarium Narasumber atau pembahas,moderator, pembawa acara dan panitia digunakan untuk Narasumber kegiatan Rapat Koordinasi PKH 6. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan merupakan tim Bansos Tunai , Honor Tim koordinasi BPNT, Honor Tim Koordinasi PKH 7. Belanja Jasa Penyelenggara Acara digunakan untuk kegiatan Rakor PKH 8. Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk petugas pada kegiatan bansos tunai 9. Belanja Bantuan Sosial diberikan kepada Kelompok Penerima Manfaat (KPM) yang terdata di DTKS namun belum pernah mendapatkan bantuan baik dari APBN maupun APBD	Rp2.587.200.000	10000 Keluarga	Kota Pontianak	
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	1. Belanja Atk digunakan untuk pelatihan bagi KPM yang mempunyai usaha 2. Belanja Barang yang di serahkan kepada masyarakat yaitu berupa bansos sosial yang diberikan kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha kecil yang terdata di DTKS dan Non DTKS 3. Belanja makanan dan minuman rapat untuk rapat persiapan pendataan kepada KPM yang mendapatkan bantuan sosial UEP dan rapat evaluasi penyaluran UEP 4. Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas lapangan untuk pelatihan bagi KPM 5. Honorarium Narasumber untuk kegiatan pelatihan kepada KPM yang mempunyai usaha kecil 6. Perjalanan Dinas dalam kota diberikan kepada peserta pelatihan	Rp378.099.500	100 Orang	Kota Pontianak	
PROGRAM PENANGANAN BENCANA						
Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota						
1	Penyediaan Makanan	1. Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa diberikan kepada Pejabat Pengadaan dan PPKom untuk penyediaan makanan 2. belanja makanan dan minuman rapat untuk rapat internal penyediaan makanan dan evaluasi kepada petugas 3. Belanja makanan dan minuman pada fasilitasi pelayanan urusan sosial berupa pemberian bantuan makanan kepada korban bencana alam/sosial selama 7 hari (3 x sehari) 4. Belanja perjalanan dinas dalam kota berupa bantuan transport yang diberikan kepada petugas yang mengantar makanan	Rp142.090.000	350 Orang	Kota Pontianak	
2	Penyediaan Sandang	1. Belanja Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa diberikan kepada Pejabat Pengadaan dan PPKom untuk penyediaan sandang 2. belanja makanan dan minuman rapat untuk rapat internal penyediaan sandang dan evaluasi kepada petugas 3. Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada	Rp159.225.000	200 Orang	Kota Pontianak	

		masyarakat kegiatan nyang dilaksanakan berupa pemberian kasur dan seragam sekolah untuk korban bencana alam/sosial 4. Belanja perjalanan dinas dalam kota berupa bantuan transport yang diberikan kepada petugas yang mengantar sandang				
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1. Belanja Bahan-Bahan Lainnya berupa pembelian Terpal untuk korban bencana alam/sosial 2. Belanja Makanan dan Minuman rapat digunakan untuk rapat kegiatan penyediaan terpal 3. Belanja Perjalanan Dinas dalam daerah digunakan untuk petugas pengantaran terpal	Rp20.000.000	100 Unit	Kota Pontianak	
4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Melakukan penanganan khusus bagi kelompok lanjut usia, kelompok ibu melahirkan dan menyusui, kelompok balita dan anak-anak, serta kelompok disabilitas korban bencana alam dan bencana sosial	Rp31.135.000	4 Orang	Kota Pontianak	
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	Melakukan pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana alam dan bencana sosial	Rp30.000.000	12 Orang	Kota Pontianak	
Kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota						
1	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	1. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi kebencanaan "Tagana Masuk Sekolah" 2. Narasumber berasal dari Tagana	Rp28.230.600	50 Orang	Kota Pontianak	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1. 2 Dokumen Perencanaan yang disusun yaitu : Renja dan Renja Perubahan 2. Menyusun Tim Penyusunan Dokumen Perencanaan 3. Mengumpulkan dan menganalisis data realisasi tahun sebelumnya dari Bidang 4. Membuat identifikasi masalah berdasarkan analisis isu strategis dan permasalahan internal Dinas Sosial 5. Melakukan rapat terkait identifikasi masalah, evaluasi realisasi kegiatan tahun sebelumnya sebagai dasar penyusunan dokumen perencanaan 6. Menyusun konsep rancangan awal dokumen perencanaan 7. Menyusun konsep rancangan akhir dokumen perencanaan setelah asistensi dengan Bapperida	Rp604.625.000	2 Dokumen	Kota Pontianak	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1. Melakukan rapat penyusunan dokumen rancangan awal RKA Dinas Sosial 2. Menyusun konsep dokumen rancangan awal RKA Dinas Sosial 3. Melakukan koordinasi ke Bapperida terkait penyusunan RKA 4. Mengikuti asistensi penyusunan RKA	Rp6.000.000	1 Dokumen	Kota Pontianak	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1. Melakukan rapat penyusunan dokumen perubahan RKA Dinas Sosial 2. Menyusun konsep dokumen perubahan RKA Dinas Sosial 3. Melakukan koordinasi ke Bappeda terkait penyusunan RKA Perubahan	Rp7.500.000	1 Dokumen	Kota Pontianak	
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1. 5 Dokumen Laporan yang disusun yaitu : Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Laporan Standar Pelayanan Minimal (SPM) TW I, Laporan SPM TW II, dan Laporan SPM TW III, Laporan SPM TW IV 2. Mengumpulkan data keberhasilan dan/atau kegagalan yang dicapai Dinas Sosial Kota Pontianak per Triwulan 3. Melakukan Analisa pengukuran kinerja kegiatan dengan membuat tabel evaluasi realisasi kinerja 4. Melakukan rapat evaluasi capaian kinerja 5. Menyusun konsep rancangan dokumen pelaporan	Rp15.000.000	5 Laporan	Kota Pontianak	
5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan Evaluasi Kinerja yaitu : Laporan Evaluasi Renja TW I, Laporan Evaluasi Renja TW II, Laporan Evaluasi Renja TW III, Laporan Evaluasi Renja TW IV, LKPJ, LPPD, SPM, SKM, dan SPIP 2. Melakukan rapat internal terkait data realisasi kinerja kegiatan per triwulan 3. Menyusun Laporan Evaluasi Kinerja per triwulan	Rp23.125.000	10 Laporan	Kota Pontianak	
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1 Melakukan input gaji dan tunjangan pada aplikasi SIPD-RI	Rp 5.518.259.277	29 Orang	Kota Pontianak	
		2 Melakukan transfer gaji dan tunjangan kepada ASN di Dinas Sosial Kota Pontianak				
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Melaksanakan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (dokumen SPJ)	Rp275.400.000	12 Dokumen	Kota Pontianak	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Melakukan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran	Rp14.920.000	18 Laporan	Kota Pontianak	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Melakukan rapat internal terkait kebutuhan pengadaan Barang Milik Daerah	Rp2.500.000	1 Dokumen	Kota Pontianak	
		2 Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah				
		3 Menginput perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah ke aplikasi SIMBADA				
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Melakukan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp42.620.000	70 Paket	Kota Pontianak	

2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Menugaskan ASN untuk mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp45.000.000	5 Orang	Kota Pontianak	
Administrasi Umum Perangkat Daerah						
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Menyediakan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp29.839.950	1 Paket	Kota Pontianak	
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Menyediakan Bahan Logistik Kantor	Rp120.000.000	4 Paket	Kota Pontianak	
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Menyediakan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp80.866.100	2 Paket	Kota Pontianak	
4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Menyediakan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Rp2.500.000	12 Dokumen	Kota Pontianak	
5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Memfasilitasi tamu yang hadir ke Dinas Sosial Kota Pontianak	Rp5.000.000	1 Laporan	Kota Pontianak	
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Melaksanakan Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah Kota Pontianak	Rp300.000.000	40 Laporan	Kota Pontianak	
7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Pengembangan website Dinas Sosial Kota Pontianak dan/atau aplikasi B'DESUT	Rp100.000.000	1 Dokumen	Kota Pontianak	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melakukan pengadaan Barang Milik Daerah berupa peralatan dan mesin lainnya	Rp300.000.000	25 Unit	Kota Pontianak	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Membuat laporan terkait administrasi penyediaan jasa surat menyurat	Rp12.000.000	12 Laporan	Kota Pontianak	
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Menyusun administrasi terkait jasa komunikasi (jaringan internet), Sumber Daya Air dan listrik	Rp276.428.550	12 Laporan	Kota Pontianak	
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Melakukan perawatan pada peralatan dan perlengkapan kantor	Rp20.000.000	2 Laporan	Kota Pontianak	
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Menyediakan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp1.054.899.200	12 Laporan	Kota Pontianak	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas	Rp159.120.000	9 Unit	Kota Pontianak	
		2 Membayar pajak kendaraan dinas				
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Melakukan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp111.010.000	100 Unit	Kota Pontianak	
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Melakukan rehabilitasi bangunan gedung yang menjadi aset Dinas Sosial Kota Pontianak	Rp100.000.000	1 Unit	Kota Pontianak	

2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

Dengan adanya penyesuaian klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Daerah sebagai akibat terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan maka pada dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 akan kami tuangkan dalam tabel rencana program, kegiatan dan pendanaan Dinas Sosial Kota Pontianak. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan, maka langkah operasionalnya harus dituang kedalam program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Dinas Sosial Kota Pontianak. Adapun Program, Kegiatan dan Sub kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2026 yang terdiri **dari 6 (enam) Program 15 Kegiatan dan 56 Sub kegiatan**. Alokasi Program, kegiatan dan sub kegiatan guna mendukung sasaran pada RPD yang juga merupakan Tujuan Dinas Sosial Kota Pontianak yaitu Menurunnya Kemiskinan. Adapun Pagu Indikatif Dinas Sosial Tahun 2026 sebesar Rp. 15.822.139.277,00 dengan sumber pendanaan untuk belanja Pegawai bersumber dari DAU dan PAD, untuk Belanja Barang bersumber dari DAU dan Dana Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Sosial bersumber dari DAU-dana bagi hasil. Adapun Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2026 terdiri dari 6 (enam) Program 15 Kegiatan dan 56 Sub kegiatan, dapat digambarkan dengan tabel sebagai berikut :

TABEL 3.2
SUMBER PENDANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL KOTA PONTIANAK TAHUN 2026

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
1	2	3	4
1.	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	PERSENTASE KEAKTIFAN POTENSI SUMBER KESEJAHTERAAN SOSIAL	DAU-Dana Alokasi Umum
1.1	Pengumpulan undangan dalam daerah Kabupaten/Kota	Persentase fasilitasi kegiatan pengumpulan sumbangan dalam daerah Kabupaten/Kota	
1.1.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan Barang	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	DAU- Dana Alokasi Umum
1.2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengembangan PPKS	DAU-Dana Alokasi Umum
1.2.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah orang mendapat peningkatan kapasitas pekerja sosial masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
1.2.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kerja Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
1.2.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
1	2	3	4
1.2.4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang meningkat kapasitasnya kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
2	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	(%) Tingkat Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	DAU- Dana Alokasi Umum
2.1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	% Tingkat Penanganan Bagi Warga Negara Imigran Tindak Kekerasan	DAU- Dana Alokasi Umum
2.1.1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Psykotik Terlantar yang ditangani dan dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	DAU- Dana Alokasi Umum
3	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	% Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial	DAU- Dana Alokasi Umum
3.1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang Pengemis diluar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti	DAU- Dana Alokasi Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
1	2	3	4
3.1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Koita	DAU- Dana Alokasi Umum
3.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia dalam 1 tahun kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
3.1.2	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah orang yang mendapatkan alat bantu peraga sesuai kebutuhan kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
3.1.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan reunifikasi keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
3.1.5	Pemberian Bimbingan Fisik,Mental,Spiritual dan Sosial	Jumlah peserta bimbingan fisik,mental spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
3.1.6	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Peserta Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar,Lanjut Usia Terlantar,serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
3.1.7	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah dan Kartu Identitas Anak	Jumlah orang yang terpenuhi kebutuhan pembuatan Nomor Induk kependudukan,Akta Kelahiran,Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
3.1.8	Akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah orang yang mendapatkan akses ke layanan Pendidikan dan Kesehatan dasar kewenangan kabupaten/kota	DAU- Dana Alokasi Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
1	2	3	4
3.1.9	Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah orang yang mendapatkan layanan data dan pengaduan kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
3.1.10	Pemberian Layanan Kedaruratan	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kedaruratan kewenangan kabupaten/kota	DAU- Dana Alokasi Umum
3.1.11	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan penelusuran keluarga kewenangan kabupaten/kota	DAU- Dana Alokasi Umum
3.2	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial	Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAFZA diluar panti	DAU- Dana Alokasi Umum
3.2.1	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di luar panti	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
3.2.2	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik,Mental spiritual dan sosial kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
3.2.3	Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV.AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga penyandang masalah kesejahteraan sosial lainnya bukan korban HIV.AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
4	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Penerima Bantuan Kebutuhan Dasar Keluarga Penerima	PAD DAU- Dana Alokasi Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
1	2	3	4
4.1	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Data fakir miskin warga kota Pontianak yang diperbaharui	DAU- Dana Alokasi Umum
4.1.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Fakir Miskin cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang di data	DAU- Dana Alokasi Umum
4.1.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga yang mendapatkan pengentasan fakir miskin Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
4.1.3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima manfaat (KPM) yang mendapatkan bantuan sosial kesejahteraan keluarga kewenangan Kabupaten/Kota	Pendapatan Asli Daerah (PAD)
4.1.4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah orang mendapatkan bantuan pengembangan ekonomi masyarakat kewenangan kKabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
5	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	% Penanganan Korban Bencana Alam dan Bencana Sosial	DAU- Dana Alokasi Umum
5.1	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana sosial Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
5.1.1	Penyediaan Makanan	Jumlah orang yang mendapatkan permakanan 3x1 hari dalam masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
5.1.2	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang mendapatkan pakaian dan kelengkapan lainnya yang tersedia pasca masa tanggap darurat (Pengungsian) kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
1	2	3	4
5.1.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah tempat pengungsian kewenangan kabupaten/kota	DAU- Dana Alokasi Umum
5.1.4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Jumlah orang yang mendapatkan penanganan khusus bagi kelompok rentan kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
5.1.4	Pelayanan Dukungan Psikosisial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan dukungan psikososial kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
5.2	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana kabupaten/kota	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
5.2.1	Koordinasi ,sosialisasi dan pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Jumlah orang yang melaksanakan koordinasi sosialisasi dan pelaksanaan taruna siaga bencana kewenangan Kabupaten/Kota	DAU- Dana Alokasi Umum
6	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	% Tingkat Kepuasan Bidang/Bagian Terhadap Pelayanan Kesektariatan	PAD,DAU- Dana Alokasi Umum
6.1	Perencanaan ,Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase tingkat kepuasan bidang/bagian terhadap pelayanan kesekretariatan	PAD, DAU- Dana Alokasi Umum
6.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	PAD, DAU- Dana Alokasi Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
1	2	3	4
6.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumn RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	DAU- Dana Alokasi Umum
6.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumn RKA- SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA-SKPD	DAU- Dana Alokasi Umum
6.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	DAU- Dana Alokasi Umum
6.1.5	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	DAU- Dana Alokasi Umum
6.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah	DAU- Dana Alokasi Umum
6.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	DAU, PAD
6.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian /verifikasi keuangan SKPD	DAU- Dana Alokasi Umum
6.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	DAU- Dana Alokasi Umum
6.3	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	DAU- Dana Alokasi Umum
6.3.1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	DAU- Dana Alokasi Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
1	2	3	4
6.4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	DAU- Dana Alokasi Umum
6.4.1	Pengadaan pakaian Dinas Beserta Atributnya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	DAU- Dana Alokasi Umum
6.4.2	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti bimbingan tehnis implementasi peraturan perundang-undangan	DAU- Dana Alokasi Umum
6.5	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi umum perangkat daerah	DAU- Dana Alokasi Umum
6.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	DAU- Dana Alokasi Umum
6.5.2	Penyediaan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistic kantor yang disediakan	DAU- Dana Alokasi Umum
6.5.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	DAU- Dana Alokasi Umum
6.5.4	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	DAU- Dana Alokasi Umum
6.5.5	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	DAU- Dana Alokasi Umum
6.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	DAU- Dana Alokasi Umum
6.5.7	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Berbasis Elektronik pada SKPD	DAU- Dana Alokasi Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
1	2	3	4
6.6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	DAU- Dana Alokasi Umum
6.6.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	DAU- Dana Alokasi Umum
6.7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	PAD DAU- Dana Alokasi Umum
6.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	DAU- Dana Alokasi Umum
6.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	DAU- Dana Alokasi Umum
6.7.3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	DAU- Dana Alokasi Umum
6.7.4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	PAD, DAU- Dana Alokasi Umum
6.8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintah Daerah	DAU- Dana Alokasi Umum
6.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan ,Biaya Pemeliharaan,Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dians Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	DAU- Dana Alokasi Umum
6.8.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	DAU- Dana Alokasi Umum

NO	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	SUMBER DANA
1	2	3	4
6.8.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	DAU- Dana Alokasi Umum

3. Proyek Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2026

Proyek Strategis Nasional (PSN) adalah proyek yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau Badan Usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dan Pembangunan daerah.

Proyek Strategis Dinas Sosial Kota Pontianak Tahun 2026 terdapat pada beberapa sub kegiatan yang dirinci pada tabel berikut :

Tabel III.2
Daftar Proyek Strategis dan Sub Kegiatan Pengampu
Tahun 2026

No	Sub Kegiatan	Proyek Strategis	Anggaran	Volume	Lokasi	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pemutakhiran data fakir miskin di lingkungan Kota Pontianak	Rp450.000.000	40.000 Orang	Kota Pontianak	
2	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Bantuan Sosial Tunai kepada Masyarakat miskin non DTKS	Rp2.896.301.200	4312 Keluarga	Kota Pontianak	
3	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Bantuan barang untuk keluarga berupa paket bantuan usaha ekonomi produktif masyarakat yang mempunyai usaha	Rp378.099.500	100 Orang	Kota Pontianak	
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Pemberdayaan masyarakat miskin melalui pelatihan satpam, pelatihan menjahit, pelatihan membuat payet, dan pelatihan membuat sandal hotrl	Rp1.000.000.000	50 Keluarga	Kota Pontianak	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Sosial Kota Pontianak

Dengan diterbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka diperlukan adanya penyesuaian terhadap program dan kegiatan serta sub kegiatan yang akan disusun pada Renja Tahun 2026 Renja Dinas Sosial Kota Pontianak yang terdiri dari 6 (enam) Program 15 Kegiatan dan 56 Sub kegiatan dapat digambarkan dalam tabel berikut ini :

TAHUN 2026

[illegible]

							umlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						10 Laporan	15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif		10 Laporan	15.000.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																		
							Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					5 Laporan	23.125.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif			5 Laporan	23.125.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah																		
							Persentase pemenuhan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	5.808.579.277,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif			100%	4.783.627.000,00	DINAS SOSIAL			
	1	06	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																		
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					34 Orang/Bulan	5.518.259.277,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif			34 Orang/Bulan	4.493.307.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.02	0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD																		
							Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD					12 Dokumen	275.400.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif			12 Dokumen	275.400.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.02	0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD																		
							Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD					48 Laporan	14.920.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	-		48 Laporan	14.920.000,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah																		

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

								Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	100%				100%	10.000.000,00					100%	10.000.000,00		
							[Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah asal yang optimal sesuai prosedur]	Persentase tingkat penanganan Warga Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	60%	100%	100%	10.000.000,00						100%	10.000.000,00		
	1	06	03	2.01		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																
	1	06	03	2.01	0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal																
							Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal Kewenangan Kabupaten/Kota				5 Orang	10.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Masyarakat	5 Orang	10.000.000,00	DINAS SOSIAL		
4	1	06	04			PROGRAM REHABILITASI SOSIAL																
							Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%				100%	1.200.250.400,00						100%	1.200.250.400,00		
						[Meningkatkan taraf hidup PPKS yang mendapatkan layanan rehabilitasi kesejahteraan sosial]	Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan layanan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	100%		100%	100%	1.200.250.400,00							100%	1.200.250.400,00		
	1	06	04	2.01		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Pantli Sosial																
							Persentase pelaksanaan penanganan dan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar	100%				100%	1.027.095.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Masyarakat	100%	1.027.095.200,00		
	1	06	04	2.01	0001	Penyediaan Permakanan																
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota				200 Orang	550.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Masyarakat	200 Orang	550.000.000,00	DINAS SOSIAL	SPM	
	1	06	04	2.01	0002	Penyediaan Sandang																
							Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota					300 Orang	150.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Masyarakat	300 Orang	150.000.000,00	DINAS SOSIAL	SPM

[illegible]

							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota						40 Orang	5.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Masyarakat	50 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL	SPM
	1	06	04	2.01	0012	Pemberian Layanan Rujukan																	
							Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota						80 Orang	5.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Masyarakat	100 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL	SPM
	1	06	04	2.01	0014	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota																	
							Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Kabupaten/Kota						40 Orang	5.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Masyarakat	40 Orang	5.000.000,00	DINAS SOSIAL	SPM
	1	06	04	2.02		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial																	
							Persentase pelaksanaan rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti	100%					100%	173.155.200,00			Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Masyarakat	100%	173.155.200,00		
	1	06	04	2.02	0006	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti																	
							Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti Kewenangan Kabupaten/Kota						100 Orang	15.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Masyarakat	100 Orang	15.000.000,00	DINAS SOSIAL	
	1	06	04	2.02	0007	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial																	
							Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota						300 Orang	37.175.200,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Masyarakat	300 Orang	37.175.200,00	DINAS SOSIAL	

[illegible]

								Jumlah Usulan Penindaklayakan, Usulan yang Terverifikasi dan Tervalidasi, dan Usulan Perbaikan yang dilaksanakan						20000 Usulan	34.980.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Masyarakat	20000 Usulan	34.980.000,00	DINAS SOSIAL	
6	1	06	06				PROGRAM PENANGANAN BENCANA								410.680.600,00							410.680.600,00		
								Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial sesuai ketentuan	100%				100%	410.680.600,00							100%	410.680.600,00		
							[Meningkatkan pelayanan, perlindungan dan jaminan sosial kepada korban bencana alam dan sosial sesuai ketentuan]	Penanganan korban bencana alam dan korban bencana sosial sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	410.680.600,00								100%	410.680.600,00		
	1	06	06	2.01			Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase pemberian perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana alam dan sosial Kabupaten/Kota	100%				100%	410.680.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Korban bencana alam dan bencana sosial	100%	410.680.600,00	DINAS SOSIAL		
	1	06	06	2.01	0001		Penyediaan Makanan																	
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota					350 Orang	142.090.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Korban bencana alam dan bencana sosial	350 Orang	142.090.000,00	DINAS SOSIAL	SPM	
	1	06	06	2.01	0002		Penyediaan Sandang																	
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota					200 Orang	159.225.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Korban bencana alam dan bencana sosial	200 Orang	159.225.000,00	DINAS SOSIAL	SPM	
	1	06	06	2.01	0004		Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																	
								Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Kabupaten/Kota					40 Orang	31.135.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Korban bencana alam dan bencana sosial	40 Orang	31.135.000,00	DINAS SOSIAL	SPM	
	1	06	06	2.01	0005		Pelayanan Dukungan Psikososial																	
								Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/Kota					12 Orang	30.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Korban bencana alam dan bencana sosial	12 Orang	30.000.000,00	DINAS SOSIAL	SPM	

	1	06	06	2.01	0007	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi															
							Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota				100 Orang	20.000.000,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Korban bencana alam dan bencana sosial	100 Orang	20.000.000,00	DINAS SOSIAL	SPM
	1	06	06	2.02		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota															
							Persentase penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana Kabupaten/Kota	100%			100%	28.230.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Masyarakat	100%	28.230.600,00		
	1	06	06	2.02	0002	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana															
							Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	28.230.600,00	Kota Pontianak, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	Memperkuat Fondasi Perekonomian Kalimantan Barat yang Inklusif dan Berkelanjutan 4. Mewujudkan Perekonomian Inklusif, Stabil, Produktif, Kreatif dan Inovatif	Masyarakat	50 Orang	28.230.600,00	DINAS SOSIAL	
	J U M L A H											15.822.139.277,00							13.991.228.400,00		

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasi berbagai persoalan-persoalan terkait dengan persoalan masyarakat khususnya dalam bidang sosial sebagai wujud nyata dari tanggungjawab Pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan kehidupan harkat dan martabat manusia seutuhnya dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan kehidupan masyarakat Kota Pontianak yang berharkat dan bermartabat sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Dinas Sosial Kota Pontianak memiliki peranan penting dalam melaksanakan tujuan menurunkan angka kemiskinan. Pentingnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) perlu didukung dengan perencanaan program dan kegiatan yang berkualitas dan tetap sasaran serta didukung oleh pemangku kepentingan dan mitra kerja yang terlatih.

Output Rencana Kerja Dinas Sosial Kota Pontianak adalah Program Tahunan Dinas Sosial Kota Pontianak yang sesuai Tupoksi dan sasaran Program Dinas Sosial Kota Pontianak. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kota Pontianak ini disusun sebagai bahan acuan serta evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Tahun anggaran sebelumnya, dengan adanya dokumen Renja diharapkan pelaksanaan anggaran dapat memberikan gambaran pelaksanaan kegiatan Dinas Sosial Kota Pontianak yang efisien serta tepat sasaran, sehingga Perencanaan dan Penganggaran yang dibuat dapat berhasil dan berdaya guna bagi pembangunan masyarakat Kota Pontianak.

Pontianak, Agustus 2025
KEPALA DINAS SOSIAL
KOTA PONTIANAK



drg. TRISNAWATI, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730610 200012 2 004